



Laporan Penelitian

MONITORING DAN EVALUASI INOVASI

1. BERAS NYAMAN

Berkas Atas SP2D Nyaman

2. BAPAMU KUAT

Balangan Pasar Murah Untuk Rakyat

3. DAKU KEREN

Data Kabupaten Untuk Perencanaan
Pembangunan

4. SIPETRUK

Sistem Penilaian Instrumen Kinerja

5. SIAP SPORING

Sistem Aplikasi Sporadik dalam
Jaringan

6. OPEDAS

Optimalisasi Pengumpulan Data
Statistik Sektoral

**BAPPEDALITBANG
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	2
DAFTAR GAMBAR	3
I. PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang	4
B. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	7
C. Manfaat Penelitian	8
D. Ruang Lingkup Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Inovasi sektor publik	10
B. Evaluasi Dampak	11
C. Pengukuran Dampak inovasi sektor publik	15
D. Kerangka Pikir.....	19
E. Operasionalisasi Konsep	21
III. METODE.....	23
IV. ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	29
D. Sistem Penilaian Instrumen Kinerja (SIPETRUK)	Error! Bookmark not defined.
E. Sistem Aplikasi Sporadik dalam Jaringan (SIAP SPORING)	Error! Bookmark not defined.
F. Optimalisasi Pengumpulan Data Statistik Sektoral (OPEDASS)	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penjelasan aspek Input, Proses dan Output.....	20
Tabel 2. Instrumen pengukuran dampak inovasi.....	21
Tabel 3. Rumus prosentase perubahan adalah sebagai berikut.....	27
Tabel 4. Perubahan Inovasi BAPAMU KUAT.....	40
Tabel 5. Perubahan Inovasi DAKU KEREN	49
Tabel 6. Perubahan Inovasi SI PETRUK.....	59
Tabel 7. Data Perubahan inovasi SIAP SPORING.....	71
Tabel 8. Data Perubahan inovasi OPEDASS	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir Pengukuran Dampak Inovasi	20
Gambar 2. Baliho Pasar Murah dan Tangkapan Layar Whatsapp.....	47
Gambar 3. Tangkapan Layar Website dakukeren.balangankab.go.id	49

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Visi Pemerintah Kabupaten Balangan adalah “**MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA, MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA**”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut misi yang diusung adalah

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif

Strategi yang diambil adalah

1. Meningkatkan konektivitas wilayah dan antar wilayah
2. Meningkatkan penataan dan pemanfaatan ruang
3. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan saluran pengairan dan irigasi
4. Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur Perumahan Permukiman
6. Meningkatkan Pengelolaan Persampahan
7. Meningkatkan efektifitas penataan dan pengendalian dampak lingkungan
8. Optimalisasi pengembangan kapasitas lingkungan hidup
9. Optimalisasi pengelolaan kenakeragaman hayati
10. Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan
11. Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa
12. Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
13. Meningkatkan Pertumbuhan Nilai Investasi
14. Menurunkan Angka Pengangguran Terbuka
15. Meningkatkan Angka Rata-Rata Lama Sekolah

16. Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah
17. Meningkatkan Usia Harapan Hidup
18. Menurunkan Angka Kematian Ibu
19. Menurunkan Angka Kematian Bayi
20. Menurunkan Prevalensi Stunting
21. Menurunkan Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun
22. Meningkatkan nilai SAKIP
23. Mempertahankan Opini BPK
24. Meningkatkan nilai EKPPD
25. Meningkatkan Indeks Pelayanan Publ
26. Meningkatkan Indeks Kepuasan
27. Penurunan angka kemiskinan
28. Meningkatkan Angka PPKS yang tertangani
29. Mempertahankan Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA
30. Meningkatkan Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum
31. Menurunkan Indeks Resiko Bencana
32. Meningkatkan Pengembangan Seni dan Budaya Balangan
33. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa

Kemudian diimplementasikan ke dalam beberapa program prioritas yakni sebagai berikut

1. Pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Pembangunan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
4. Peningkatan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif

Inovasi daerah sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kriteria inovasi daerah harus memenuhi sebagai berikut :

- a. Mengandung pembaharuan sebagian atau seluruh unsur inovasi

- b. Memberi manfaat bagi daerah dan atau masyarakat
- c. Tidak mengakibatkan pembebanan dan pembatasan pada masyarakat
- d. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- e. Dapat direplikasi
- f. Inovasi dibagi menjadi inovasi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan bentuk inovasi daerah lainnya.

Tujuan inovasi daerah sesuai dengan PP Nomor 38 tahun 2017 adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk mencapai tujuan tersebut sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Prestasi inovasi Kabupaten Balangan adalah pada tahun 2021 nilai indeks inovasi daerah adalah 42,62 (inovatif), tahun 2022 meningkat menjadi 57,57 (inovatif). Namun untuk peringkat meningkat cukup tinggi yakni dari peringkat 166 menjadi peringkat 45 dari 508 kabupaten/ kota di Indonesia. Peningkatan prestasi yang cukup signifikan ini diperoleh dari peningkatan metode penjaringan inovasi daerah, pendampingan monitoring evaluasi pengisian data dukung kelengkapan inovasi sesuai indikator parameter Kemendagri, dan peningkatan kapabilitas dan keterampilan SDM inovasi (tim Klinik Inoba, Pamong Inovasi, Inovator dan Admin inovasi).

Monitoring ada evaluasi implementasi program menjadi salah satu indikator penilaian inovasi daerah, sebagaimana diketahui dalam juknis terbaru Kementerian Dalam Negeri bahwa indikator monitoring evaluasi mengukur kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah, dilihat dari a) hasil laporan monitoring evaluasi internal perangkat daerah, b) hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi survei kepuasan masyarakat, c) hasil laporan monitoring evaluasi eksternal berdasarkan hasil penelitian/ kajian/ analisis.

Keberhasilan program dapat diukur dengan cara a) menetapkan tujuan dan indikator sebagai alat ukur diukur untuk masing-masing tujuan tersebut, b) Mengumpulkan data berupa angka statistik, survei, wawancara, atau informasi lain yang relevan dengan tujuan program, c) Analisis Data untuk mengevaluasi hasil program, d) Evaluasi Kualitatif untuk mendapatkan umpan balik dari peserta program, stakeholder, atau pihak terkait melalui metode wawancara,

tinjauan literatur, atau diskusi kelompok, e) Bandingkan data dan temuan dengan target yang telah ditetapkan, apabila telah mencapai tujuan yang ditetapkan atau memenuhi harapan yang diharapkan, jika ada ketidaksesuaian, identifikasi faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hasil tersebut, f) Perbaiki dan pelajari hasil evaluasi program untuk meningkatkan dan mengoptimalkan program di masa depan.

Tujuan dilaksanakannya evaluasi implementasi program inovasi adalah a) mengukur keberhasilan implementasi program inovasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, b) mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dengan melibatkan pengumpulan dan analisis data pada aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, c) mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dialokasikan untuk inovasi, melibatkan pengukuran biaya, waktu dan sumber daya untuk pelaksanaan inovasi, c) melingkatkan pembelajaran organisasi karena hasil analisis dan temuan inovasi mengidentifikasi rekomendasi untuk membantu mengubah budaya dan proses organisasi untuk mendorong inovasi yang berkelanjutan, d) mendukung pengambilan keputusan karena evaluasi program inovasi menyediakan informasi penting yang dapat dipergunakan pengambil keputusan terkait pengembangan dan inventarisasi di bidang inovasi.

Mempertimbangkan hal tersebut maka perlu dilaksanakan penelitian evaluasi implementasi inovasi daerah untuk mengukur keberhasilan, efisiensi dan efektivitas program inovasi guna memberikan masukan bagi pengembangan dan keberlanjutan implementasi program inovasi.

B. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah mengetahui efisiensi dan efektivitas implementasi program inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan membantu kemudahan tata kelola pemerintahan Kabupaten Balangan.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi perubahan yang terjadi sebagai salah satu dampak dari implementasi inovasi dilihat dari tahap input, proses, output dan dampak
2. Mengetahui kelemahan/ hambatan/ kendala yang dihadapi dalam implementasi inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

3. Aspek-aspek apa saja yang mengalami perubahan sebagai dampak dari implementasi inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Balangan khususnya SKPD, BLUD dan UPT Puskesmas yang telah melaksanakan inovasi terkait dengan implementasi program inovasi yang selama ini telah dilaksanakan
2. Mengetahui dan memberikan informasi mengenai area perbaikan inovasi di sektor publik
3. Teridentifikasinya aspek-aspek yang mempengaruhi capaian dampak inovasi dan rekomendasi langkah strategis yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan keberhasilan implementasi program inovasi

D. Ruang Lingkup Penelitian

Lokus pelaksanaan penelitian evaluasi dampak Inovasi adalah di Kabupaten Balangan khususnya terkait pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta inovasi bentuk lainnya yang menjadi urusan dan kewenangan pemerintah daerah.

- a. Inovasi pelayanan publik yakni inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik
- b. Inovasi tata kelola pemerintahan merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- c. Inovasi daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi yang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (berdasarkan PP nomor 38 tahun 2017 pasal 5 tentang inovasi daerah).

Inovasi yang menjadi obyek penelitian adalah inovasi yang telah dilaksanakan minimal 2 (dua) tahun rentang tahun 2021 sampai 2022.

Pengukuran dampak dilakukan pada level mikro, yaitu pengukuran dampak inovasi pada tataran output yang dihubungkan dengan ada tidaknya perubahan yang terjadi dari setiap pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan dan inovasi bentuk lainnya.

Ruang lingkup substansi penelitian ini adalah

- a. Identifikasi perubahan sebelum dan setelah implemenasi inovasi
- b. Identifikasi faktor kelemahan/ hambatan/ kendala implementasi inovasi
- c. Menyusun rekomendasi bagi pemerintah dan lembaga terkait agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi inovasi

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Inovasi sektor publik

Secara umum, inovasi dapat dipahami sebagai proses perubahan perilaku. Inovasi bergerak dalam ruang yang dinamis dan senantiasa mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Menurut Everett M Rogers, inovasi adalah sebuah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. Begitu halnya dengan pandangan Albury (dalam suwarno, 2008 : 10) yang secara lebih sederhana mendefinisikan inovasi sebagai new ideas that work. Pengertian ini menekankan bahwa inovasi berhubungan erat dengan ide-ide baru (invention) yang bermanfaat. Mendefinisikan inovasi di sektor publik tidaklah sama dengan mendefinisikan inovasi di sektor privat. Inovasi tidak hanya menyangkut sesuatu yang baru, tetapi juga memberikan nilai tambah, baik dalam bentuk proses ataupun output dari suatu produk jasa/barang. Karena itulah, maka definisi sederhana dari inovasi sektor public adalah tentang bagaimana ide-ide baru itu bekerja untuk menciptakan nilai publik (OECD, 2014). Adapun karakteristik inovasi di sektor publik (OECD Observatory) adalah sebagai berikut:

- 1. Kebaruan:** inovasi memperkenalkan pendekatan baru, sesuai dengan konteks atau lingkungan di mana inovasi akan diterapkan
- 2. Implementasi:** inovasi harus dilaksanakan, bukan hanya sekedar ide
- 3. Dampak:** inovasi bertujuan untuk menghasilkan nilai publik yang lebih baik termasuk efisiensi, efektivitas, dan kepuasaan pengguna atau karyawan.

Kebijakan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah, dinyatakan bahwa “Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuan tersebut diarahkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah”. Selanjutnya dinyatakan bahwa inovasi daerah dapat berbentuk :

1. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, yang merupakan pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

2. Inovasi Pelayanan Publik, yang merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
3. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; yang merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

B. Evaluasi Dampak

Dampak adalah hasil jangka panjang yang dihasilkan oleh suatu program, proyek atau kebijakan, termasuk hasil yang diharapkan dan tidak diinginkan terjadi, dampak positif dan negatif, serta dampak langsung dan tidak langsung (Australian Gov; Department of industry, innovation, and science, 2015). Identifikasi dampak ini bertujuan untuk melihat perbedaan utama dari suatu program atau kebijakan yang telah dilaksanakan berdasarkan tujuan pelaksanaan. Hal ini pula, yang oleh International Fund for Agricultural Development (IFAD) ikut mendefinisikan dampak sebagai cara untuk melihat pencapaian tujuan proyek atau program, atau lebih tepatnya terkait dengan kontribusi untuk pencapaian tujuan yang dilakukan yang keseluruhannya dapat ditempuh melalui satu instrumen pelaksanaan bernama impact evaluation atau evaluasi dampak.

Evaluasi dampak merupakan penyelidikan yang sistematis dan empiris terhadap dampak yang dihasilkan oleh suatu intervensi. Proses ini akan menentukan apakah suatu intervensi telah sesuai dengan tujuan yang diinginkan dari program atau kegiatan atau tidak sama sekali. Selain itu, evaluasi dampak ini juga bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang berhasil atau tidak berhasil, bagaimana, untuk siapa, dan mengapa hal itu terjadi (*Impact Evaluation: A discussion paper for AusAID practitioners*, 2012). Evaluasi dampak dapat memberikan bukti secara nyata tentang dampak yang telah diproduksi (dampak yang diharapkan). Selain bukti yang kredibel tersebut, evaluasi dampak juga dapat mengarahkan pada inferensi kausal bahwa terjadinya perubahan sebagai bagian dari hasil pelaksanaan proyek, program atau kebijakan. Maka dari itu, Evaluasi dampak dapat digambarkan sebagai suatu kegiatan untuk menilai perubahan-perubahan yang terjadi dalam kelompok sasaran, yang diakibatkan oleh program/proyek/kebijakan dan merupakan hasil dari kegiatan program/proyek/kebijakan.

Menurut Finsterbusch dan Motz dalam Tangkilisan (2003:28), menyebutkan ada empat jenis evaluasi dampak yaitu :

1. Evaluasi *single program after-only*. Jenis evaluasi ini merupakan yang paling lemah karena tidak diketahui baik tidaknya suatu program terhadap kelompok sasaran, dan tidak diketahui juga kelompok sasaran sebelum menerima program.
2. Evaluasi *single program before-after*. Jenis ini dapat digunakan untuk mengetahui keadaan kelompok sasaran sebelum menerima program tetapi tidak dapat mengetahui efek dari program tersebut
3. Evaluasi *comparative after-only*. Merupakan evaluasi dengan cara membandingkan kelompok sasaran dengan kelompok bukan sasaran. Pada evaluasi jenis ini efek program terhadap kelompok sasaran tidak diketahui
4. Evaluasi *comparative before-after*. Merupakan gabungan dari ketiga kelompok diatas. Sehingga kelemahan yang ada diketiga desain diatas dapat diatasi oleh desain evaluasi ini.

Selain itu, ada pula jenis evaluasi dampak yang digunakan sebelum dan sesudah dan selama program dilaksanakan (Australian Gov; Department of industry, innovation, and science, 2015) yaitu :

1. *Ex post impact evaluation*, mengumpulkan data terkait actual impact
2. *Ex ante impact evaluation*, meramalkan kemungkinan dampak yang akan terjadi
3. *During implementation*, mengumpulkan data tentang kesesuaian dampak program yang dihasilkan dengan dampak yang diinginkan.

Patton dan Sawicky menguraikan 6 (enam) bentuk pendekatan evaluasi dasar yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi program, yaitu :

1. *Before and after comparisons*,

Pendekatan yang membandingkan kondisi (orang atau penduduk suatu daerah) sebelum dan sesudah program (*actual postprogram data*). Selain itu, pendekatan ini juga dapat digunakan untuk membandingkan kondisi masyarakat sesudah program dijalankan (*actual postprogram data*) dengan masyarakat yang tidak menjalankan program atau kebijakan tersebut.

2. *With and without comparisons*.

Pendekatan untuk membandingkan antara grup target yang menerima program dan yang tidak. Adapun batasan-batasan antara pendekatan ini dan

pendekatan pada nomor satu diatas adalah perlunya pemilihan kelompok yang akan dibandingkan dengan tepat, adanya asumsi bahwa perubahan-perubahan yang diamati di tempat kejadian perkara dapat dikenali.

3. *Actual-versus-planned performance comparisons.*

Pendekatan ini membandingkan data pasca pelaksanaan program secara aktual pada sasaran program yang timbul pada periode waktu sebelumnya (biasanya sebelum implementasi program). Analis menentukan tujuan dan target yang spesifik untuk membuat kriteria evaluasi sebelum program dilaksanakan guna mengetahui periode waktu pelaksanaan program dan menentukan data yang dibutuhkan dari performa program yang dilaksanakan analis dalam hal ini membandingkan performa kebijakan secara actual terhadap kondisi masyarakat yang tidak menerima program.

4. *Experimental (controlled) models*

Pendekatan ini menggunakan konsep kontrol ekuivalen dan kelompok yang diuji cobakan serta ukuran-ukuran pra dan pasca pelaksanaan program. Unit analisis adalah individu dalam kelompok yang dipilih secara acak. Individu yang dimaksud adalah yang menerima atau melaksanakan program dan tidak atau melaksanakan program yang berbeda dengan kelompok yang dijadikan kelompok uji coba.

5. *Quasi-experimental models*

Pendekatan *Quasi-experimental models* mencoba mengukur hasil atau outcome dari program atau kebijakan melalui skor, angka atau indikator lainnya. Selain itu pendekatan ini juga mencoba untuk mempertahankan logika percobaan tanpa menggunakan suatu prosedur, teknik ataupun hal lainnya. Pendekatan ini memiliki 2 rancangan dasar yang dapat digunakan untuk melakukan analisis hasil pelaksanaan program terhadap target grup, yaitu rancangan non equivalent control group dan rancangan interrupted time-series design. Rancangan non equivalent control group melakukan perbandingan dari treatment group dan grup lainnya yang diujicobakan program, baik sebelum dan sesudah kebijakan atau program dilaksanakan. Adapun rancangan yang kedua melakukan perbandingan treatment grup dari waktu ke waktu baik sebelum dan sesudah program dilaksanakan. Misalnya kondisi kelompok masyarakat sebelum pelaksanaan program diamati beberapa kali.

6. Cost-oriented approaches

Pendekatan Cost-oriented approaches merupakan jawaban atas kondisi yang mengharuskan mengukur dampak kebijakan dalam satuan uang, estimasi biaya dan keuntungan bersih dari perubahan yang terdeteksi dari pelaksanaan program, mengukur keuntungan yang terlihat maupun tidak serta biaya yang harus dikeluarkan baik secara langsung atau uang, maupun tidak langsung (dampak buruk yang akan dirasakan kedepannya).

Kajian The World Bank tahun 2006 tentang *Conducting Quality Impact Evaluations Under Budget, Time And Data Constraints* mengemukakan bahwa ada berbagai pilihan desain evaluasi dampak dimulai dari metode yang terkuat hingga lemah yaitu:

- 1. Pre- and post intervention project and control group design with randomized or non-randomized assignment.*

Desain ini merupakan desain evaluasi paling kuat yang mengkombinasikan evaluasi pre and post intervention dengan menggunakan data awal/dasar dan melibatkan perbandingan antar kelompok.

- 2. Delayed pre-test/post-test comparison group design.*

Desain ini bermanfaat ketika proses evaluasi dimulai dalam jangka menengah. Hal ini karena desain ini tidak menggunakan data awal/dasar (baseline), namun lebih pada penguatan evaluasi mid-term dan post intervention.

- 3. Pre-and post-intervention project group and post-intervention comparison group.*

Meskipun desain ini lebih lemah dari sebelumnya, namun desain ini memungkinkan untuk melihat perbandingan dari waktu ke waktu dan analisis transversal pasca proyek. Dalam desain ini tidak menggunakan preintervention terkait perbandingan kelompok, tetapi hanya menggunakan post-intervention.

- 4. Post-intervention project and comparison groups with no baseline data.*

Desain evaluasi ini hanya memfokuskan pada evaluasi dampak terhadap post-intervention data proyek dan perbandingan antar kelompok dan tanpa menggunakan baseline data.

- 5. Pre- and post-implementation project group analysis with no comparison group*

Desain ini menghilangkan analisis terhadap evaluasi dampak dengan kelompok pembanding, namun tetap menggunakan pre and post intervention untuk proyek kelompok dan baseline data.

6. *Post-intervention project group without baseline data or a comparison group.*

Ini merupakan desain evaluasi yang paling lemah karena memfokuskan proses evaluasi post intervention tanpa pre-intervention dan berdasarkan baseline data.

C. Pengukuran Dampak inovasi sektor publik

Pengukuran dampak inovasi sektor publik cenderung lebih sulit daripada sektor privat (NESTA, 2011). Hal ini karena pengukuran di sektor publik tidak hanya dilakukan dari output keuangan semata, namun juga pada nilai publik yang dihasilkan. Menurut kajian NESTA, indeks inovasi sektor publik setidaknya mencakup empat bidang, yaitu :

1. *Improvement in organisational key performance indicators*
2. *Improvement in service evaluation*
3. *Improvement in efficiency*
4. *Improvement context*

Salah satu pengukuran dampak inovasi yang dilakukan di sektor publik misalnya dalam Innovation in Public Sector Organisations, A Pilot Survey in measuring innovation across the public sector yang dilakukan oleh National Endowment for Science, technology, and the Arts (NESTA) of United Kingdom pada tahun 2011. Survey ini menjadi stimulus untuk membuat indeks pengukuran inovasi organisasi sektor publik yang sangat berguna bagi pembuat kebijakan, peneliti, dan institusi lainnya yang berhubungan dengan sektor publik. Jenis pengukuran inovasi yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah inovasi berupa jasa (dalam penelitian ini jasa dalam bidang kesehatan). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan menggunakan kuesioner, indicator yang digunakan dalam kuesioner ini adalah mengadopsi Private Sector Index Survey. Adapun indikator-indikator tersebut berupa :

1. *Efficiency*, terkait dengan efisiensi biaya yang terjadi setelah adanya inovasi
2. *Quality*, terkait dengan kualitas dari layanan inovasi.
3. *Access to service*, terkait dengan akses pelayanan yang semakin mudah atau malah justru semakin sulit.

4. *Costumer Feedback*, terkait dengan apakah terdapat ruang bagi konsumen untuk memberikan feedback dalam rangka peningkatan inovasi.
5. *Speed Of Delivery*, terkait dengan lama waktu yang dibutuhkan untuk satu layanan tertentu.
6. *Range Of Services*, terkait dengan seberapa jauh jangkauan pelayanan yang diberikan setelah inovasi.

Pengukuran dampak inovasi sektor publik lainnya juga dilakukan SEAT (*Socio Economic Assesmet Toolbox*) yang merupakan sebuah perangkat penelitian yang digagas oleh Government and Social Affairs, Pemerintah Inggris pada tahun 2012 untuk menilai seberapa besar dampak dari sebuah inovasi kebijakan pemerintahan terhadap perubahan sosial-ekonomi masyarakat yang diafirmasikan ke dalam kebijakan ini. Penelitian tersebut menilai dengan cara yang holistik dengan asumsi bahwa kelima indikator bisa sesuai dengan tahapan implementasi inovasi. Pada studi kasusnya, kebijakan pemerintah Inggris yaitu dengan mendorong terbentuknya kelompok pekerja yang berlatar belakang Anglo American, untuk bisa diakselerasi tingkat perekonomian di daerah dekat pertambangan, sekaligus mengubah sosial-kultural masyarakat yang pasif akan kondisi ekonomi. Metode yang digunakan untuk menilai keberhasilan adalah dengan metode kualitatif, dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan kelompok pekerja tersebut. Tujuan FGD tersebut yaitu untuk menilai seberapa jauh indikator tersebut telah berjalan sesuai dengan tujuannya. Adapun indikator tersebut sebagai berikut :

1. *Inform*, Memberikan informasi yang seimbang dan objektif terkait adanya inovasi kepada stakeholders dengan tujuan awareness
2. *Consult*, Memberikan informasi yang seimbang dan objektif terkait adanya inovasi kepada stakeholders dengan tujuan pemahaman.
3. *Involve*, Melibatkan secara langsung stakeholders dengan tujuan mendapatkan feedback dan alternative inovasi.
4. *Collaborate*, Merumuskan sebuah inovasi bersama stakeholders dengan menjamin berjalannya aspirasi, ide, dan gagasan.
5. *Empower*, Memberdayakan secara mandiri stakeholders untuk dapat menjalankan inovasi dengan tujuan sustainability.

Di berbagai negara, pengukuran dampak inovasi tidak hanya dilakukan oleh lembaga pemerintah. TEKES (*The Finnish Funding Agency for Technology and Innovation*) yang merupakan sebuah badan atau organisasi di Finlandia turut serta berkontribusi dalam melakukan berbagai pengukuran dampak inovasi yang bidangnya fokus pada financing research, development and innovation. TEKES saat ini telah mendukung berbagai kegiatan inovasi yang luas di bidang riset, industri dan sektor jasa. Tujuannya agar program bidang penelitian, pengembangan dan inovasi dapat menciptakan keuntungan jangka panjang bagi ekonomi dan sosial masyarakat. Salah satu indikator pengukuran dampak inovasi yang dihasilkan bernama Tekes Model. Tekes model ini pernah digunakan oleh beberapa organisasi yang juga bergerak disektor pengembangan inovasi khususnya pada sektor privat yang juga berdampak pada ekonomi dan sosial masyarakat, seperti GAP (Global Access Program) di University of California dan VINNOVA yang merupakan organisasi di Swedia yang berfokus pada pengukuran dampak pertumbuhan berkelanjutan di Swedia.

TEKES mengembangkan sebuah General logic model for innovation yang didalamnya mengukur dampak inovasi. Model ini membagi dampak inovasi kedalam tiga garis besar yaitu immediate Impacts, Intermediate Impacts dan Ultimate Impacts.

1. Immediate Impacts

Immediate impacts menekankan pada konteks increased resources or capabilities. Dari konteks ini dapat dijabarkan sejumlah indikator berdasarkan pada ide/gagasan inovasi yang dikembangkan. Berikut indikatornya:

- Information and advice

Dampak ini berfokus bagaimana kemampuan inovasi dapat memberikan informasi kepada masyarakat sehingga menimbulkan suatu feedback terhadap penyelenggara inovasi yang dinamakan sebagai advice (saran).

- Competence

Indikator ini berfokus pada sejauh mana inovasi telah menghasilkan peningkatan kemampuan dan keahlian pada individu atau masyarakat.

- On raising capital / Strengthened Resource

Terkait dengan peningkatan modal dan penguatan sumber daya yang dimiliki suatu daerah

- Business linkages with service providers

Jika dalam sector privat menekankan pada bagaimana hubungan bisnis dengan penyedia layanan, maka untuk sektor publik dapat menekankan pada hubungan penyedia layanan dan masyarakat terkait dengan program inovasi.

- On selling in new markets

Inovasi dapat berdampak pada terbukanya jaringan pasar/markets baru bagi masyarakat sebagai akibat dari program inovasi

2. Intermediate Impacts

Kunci utama dari Intermediate impacts menekankan pada improved performance. Indikator ini bertumpu pada konteks peningkatan kinerja sebagai bagian dampak inovasi. Adapun indicator yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- *Increased revenues*

Terkait dengan terjadinya peningkatan pendapatan rata-rata baik individu atau masyarakat

- *Increased employment*

Terbukanya lapangan kerja dan kesempatan bekerja bagi masyarakat yang lebih luas.

- *New products and service*

Dampak inovasi terkait dengan adanya produk baru yang dihasilkan yang memiliki nilai lebih dari sebelumnya. Begitu halnya dengan kualitas pelayanan yang lebih mudah, murah, nyaman, tidak berbelitbelit, dapat diakses, dan sebagainya.

- *Productivity*

Dampak inovasi terkait dengan terjadinya peningkatan produktivitas kinerja dalam masyarakat

- *Reduced environmental impact*

Kemampuan inovasi terkait juga pada sejauh mana inovasi dapat mengurangi dampak lingkungan yang dapat mungkin menyebabkan produktivitas masyarakat berkurang.

- *Increased investment and collaboration*

Inovasi dapat menyebakan peningkatan investasi atau penanaman modal dan juga pihak lain untuk turut terlibat berkolaborasi terhadap program inovasi

- *Renewal of Business/organizational structures*

Terkait dengan proses perubahan dan pembaharuan struktur organisasi, kewenangan, tugas dan fungsi yang sesuai dengan konteks program inovasi

3. *Ultimate Impacts*

Ultimate Impacts menekankan pada konteks socio-economic benefit yang dihasilkan oleh program inovasi. Adapun sejumlah indikator yang dapat dijabarkan berupa :

- *Sustainable wealth and job*

Terjadi peningkatan kekayaan dan lapangan pekerjaan secara berkelanjutan

- *Environmental and health care improvement*

Terciptanya lingkungan yang nyaman dan perbaikan serta peningkatan tingkat kesehatan masyarakat

- *Regional Viability/vitality*

Inovasi berdampak pada meningkatnya angka harapan/kesempatan hidup di suatu wilayah atau daerah

- *Safety and security*

Dampak inovasi terkait dengan rasa aman dan jaminan keamanan bagi masyarakat

- *Social well-being*

Inovasi memberikan dampak pada kemandirian dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

D. Kerangka Pikir

Pengukuran dampak inovasi dilakukan untuk mengetahui dampak dari suatu program inovasi yang telah berjalan. Dalam pelaksanaan ini, pendekatan evaluasi yang digunakan menggunakan pendekatan before after comparison (Patton and Sawicky) yang dikombinasikan dengan pendekatan *Post intervention project group without baseline data or a comparison group (World Bank)*. Pada pendekatan before after comparison, program inovasi akan diukur dengan membandingkan kondisi

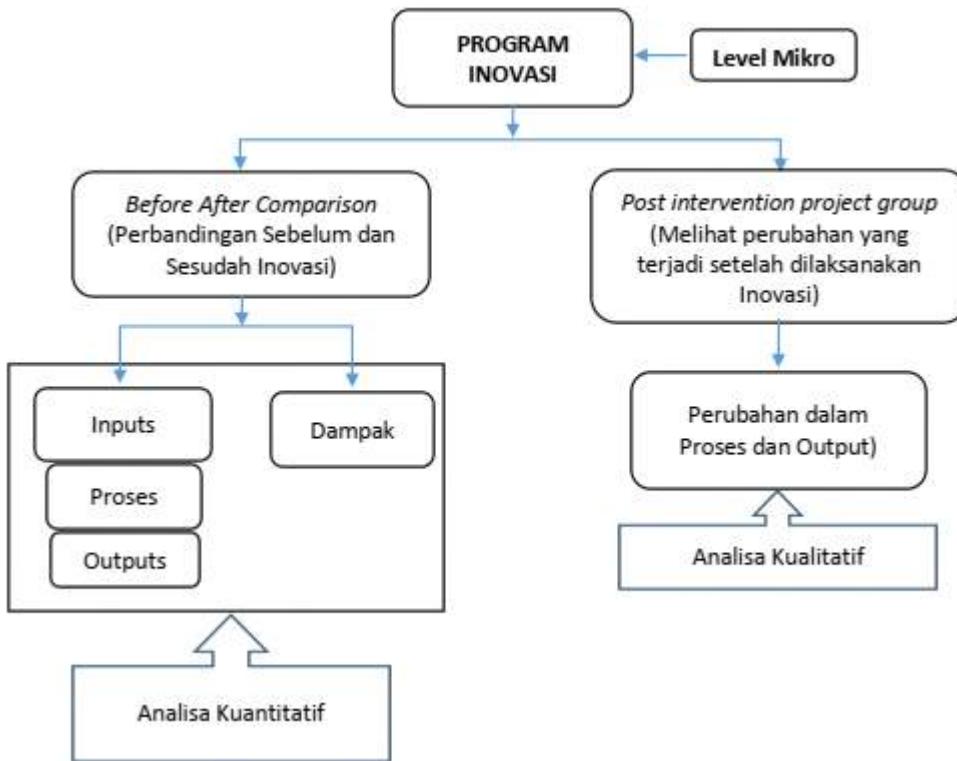
sebelum inovasi dan sesudah inovasi dilaksanakan. Pendekatan *Post-intervention project group without baseline data or a comparison group*, pendekatan evaluasi yang langsung memfokuskan pada ada/tidaknya perubahan yang ditimbulkan dari suatu proses tanpa melibatkan penggunaan baseline data ataupun perbandingan antar grup dalam proses pengukuran dampak inovasi. Pendekatan before after comparison, dioperasionalkan dengan menggunakan pembandingan kelompok indikator seperti: **input dengan input, proses dengan proses, dan output dengan output**. Indikator dalam masingmasing kelompok, adalah:

Tabel 1. Penjelasan aspek Input, Proses dan Output

INPUT	PROSES	OUTPUT
1. Biaya/anggaran/dana; 2. Sumber Daya Manusia; 3. Kelengkapan yang menjadi pendukung proses.	1. Mekanisme/ prosedur yang dilakukan; 2. Waktu layanan	1. Produktivitas; 2. Kualitas hasil

Pendekatan Post-intervention project group without baseline data or a comparison group diukur berdasarkan pada **dampak/perubahan yang terjadi** (yang langsung bisa dilihat dari data atau wawancara/testimoni). Pendekatan ini digunakan terhadap kondisi perubahan yang dirasakan oleh pelaku atupun pihak lain, namun tidak memiliki data sebelumnya yang bisa dijadikan pembanding secara kuantitatif. Oleh karena itu, hasil pengukuran dari pendekatan ini lebih bersifat kualitatif yang didasarkan pada deskripsi hasil wawancara atau testimoni. Alur pikir untuk melakukan pengukuran dampak inovasi ini, digambarkan dalam skema alur sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pikir Pengukuran Dampak Inovasi



E. Operasionalisasi Konsep

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka untuk mengoperasionalkan indikator-indikator pengukuran dampak inovasi ini, diuraikan lebih lanjut dalam bentuk operasionalisasi konsep pengukuran yang selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan instrumen pengukuran dampak inovasi. operasionalisasi variabel dan indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Instrumen pengukuran dampak inovasi

Variabel	Indikator	Dimensi Konseptual	
Input	Biaya/ Anggaran	Biaya Langsung	Biaya yang dikeluarkan oleh penerima layanan (biaya administrasi/ tarif layanan) Biaya modal yang dikeluarkan untuk usaha atau menghasilkan produk
		Biaya tidak langsung	Biaya yang dikeluarkan oleh penerima layanan untuk memperoleh produk layanan seperti: biaya transport, akomodasi, dll.
	SDM Pelaksana	Jumlah	Jumlah SDM yg terlibat dalam penyelenggaraan layanan (jumlah pegawai yang terlibat dalam alur 1 jenis layanan)
	Kelengkapan kerja	Peralatan/ fasilitas pendukung kinerja pelayanan	Peralatan & perlengkapan yg mendukung penyelenggaraan pelayanan (komputer, mobil, atk, meja, ketersediaan ruangan ataubangunan khusus, dll)
Proses	Mekanisme	Prosedur penerapan layanan	Persyaratan mendapatkan layanan dan unit layanan yg dilalui.
		Metode mendapatkan layanan	Cara yg dilakukan untuk mendapatkan pelayanan (online/offline, pendeklegasian wewenang, jemput-bola, pesan antar, dll)

Variabel	Indikator	Dimensi Konseptual	
	Waktu layanan	Waktu pelayanan	Seberapa lama waktu yg digunakan untuk menghasilkan pelayanan.
Output	Produktivitas	Jumlah layanan yang dihasilkan	Jumlah layanan yg dihasilkan dalam Periode waktu tertentu (perjam/hari/bulan) atau, Jumlah penerima layanan publik yang dapat dilihat dari; jumlah pemohon, jumlah pengunjung, dsb.
		Jumlah produksi usaha	Omzet produksi usaha masyarakat.
	Kualitas	Kualitas mutu layanan	Mutu produk layanan. Bisa dilihat dari kualitas produk hasil layanan; Survey Kepuasan Masyarakat; atau analisa atas tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya, dan prosedur layanan
Dampak	Pendapatan pemerintah	Jumlah pendapatan pemerintah daerah	Jumlah pendapatan pemerintah daerah yg diperoleh dari inovasi (pendapatan daerah; pajak, retribusi masyarakat)
		Jumlah pendapatan masyarakat	Jumlah pendapatan yang diperoleh masyarakat setelah mendapatkan program inovasi (penghasilan, laba usaha)
	Tingkat kesejahteraan masyarakat	Perubahan kondisi kemiskinan	Perubahan indikator statistik kemiskinan di daerah tersebut.
		Penyerapan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yg terserap setelah dilaksanakan inovasi
	Tingkat kesadaran/ perubahan pola pikir	Perubahan pola pikir/ kesadaran/ kedisiplinan pegawai pemerintah	Perubahan pola berfikir atau peningkatan kesadaran atau kedisiplinan pegawai pemerintah atas suatu isu/ permasalahan di organisasi
		Perubahan pola pikir/ kesadaran/ kedisiplinan masyarakat	Perubahan pola berfikir atau peningkatan kesadaran atau kedisiplinan masyarakat atas suatu isu/ permasalahan di daerah.
	Peningkatan pengetahuan atau keterampilan	Peningkatan pengetahuan atau keterampilan masyarakat	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat

Sumber : Pengukuran Dampak Inovasi, LAN, 2018

III. METODE

A. Pendekatan Penelitian

Kegiatan Pengukuran Dampak Inovasi merupakan aktivitas evaluasi dampak program inovasi yang telah diimplementasikan oleh SKPD/ Unit Kerja pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan berbasis kuantitatif dan kualitatif (eksplorasi) dengan memilih metode before after comparison (kuantitatif) dan Post Test Without Comparison Group and Baseline Data (kualitatif). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori atau instrument yang ada sebagai bahan penjelasan dan berakhir dengan sebuah teori. Penelitian ini bersifat objektif karena aspek terpenting dalam paradigma penelitian post-positivistis adalah sikap objektif dimana peneliti harus menguji kembali metode-metode dan kesimpulan-kesimpulan yang sekiranya mengandung bias (Creswell, 2010: 10)

B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam kegiatan pengukuran dampak inovasi, teknik pengumpulan data yang akan dilakukan antara lain :

- a. Studi Literatur**, merupakan teknik pengumpulan data sekunder dengan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal maupun bahan bacaan tertulis lainnya yang terkait dengan penentuan instrumen untuk pengukuran dampak inovasi. Dalam hal ini, studi literatur yang dilakukan adalah mengumpulkan teori-teori mengenai dimensi atau aspek pengukuran dampak inovasi terdahulu.
- b. Focus Group Discussion (FGD)**, Irwanto (2006: 1-2) mendefinisikan FGD adalah suatu proses pengumpulan data primer dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Permasalahan yang dibahas dalam FGD sangat spesifik karena untuk memenuhi tujuan yang sudah jelas. Oleh karena itu, pertanyaan yang disusun dan diajukan kepada para peserta FGD jelas dan spesifik. Dalam kegiatan ini FGD dilakukan dengan memberikan arahan mengenai pengisian

instrumen pengukuran dampak inovasi dimulai dari Judul, deskripsi, kegiatan, tujuan dan manfaat, serta deskripsi before-after inovasi berdasarkan masing-masing instrumen.

- c. **Wawancara mendalam**, Wawancara-Mendalam (In-depth Interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Sutopo 2006: 72). Dalam kegiatan pengukuran dampak inovasi, setelah dilakukan FGD, peneliti menentukan inovasi yang dipilih untuk dilakukan wawancara dan observasi lapangan serta memilih instrumen yang paling berdampak terhadap stakeholders serta menyusun pedoman wawancara.
- d. **Observasi lapangan**, Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-participant. Artinya, penulis melaksanakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian akan tetapi tidak ikut serta dalam proses kerja. Pengamatan dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap fenomena dari objek yang diukur. Pengamatan dilakukan dalam rangka merekam keadaan, kegiatan, dan kejadian-kejadian di lapangan yang berkaitan dengan instrumen pengukuran dampak inovasi.

C. Instrumen pengukuran

Instrumen yang digunakan untuk menggali data adalah:

- a. **Angket**, Angket merupakan teknik sekaligus instrumen pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Selain itu, angket juga digunakan sebagai panduan untuk melakukan wawancara dan observasi.
- b. **Data Sekunder**, Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

D. Kriteria Penentuan Sampling

Sampling untuk pengukuran dampak inovasi ini, dibagi ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu: Sampling untuk lokus dan sampling untuk jenis inovasi yang akan diukur. Penentuan sampling tersebut, didasarkan pada sejumlah kriteria seperti:

- a. Merupakan inovasi yang digagas oleh pemerintah daerah yang sampai saat ini masih berjalan dan telah dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 tahun.
- b. Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah mereka yang pernah terlibat dalam penyelenggaraan Laboratorium Inovasi tahun 2015-216.
- c. Inovasi yang memiliki klasifikasi :
 - Pelayanan Publik, merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
 - Tata Kelola Pemerintahan merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
 - Inovasi Daerah Lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2017 Pasal 5 tentang Inovasi Daerah). Dalam kegiatan Pengukuran Dampak Inovasi, Inovasi Daerah Lainnya yaitu Inovasi Pemberdayaan Masyarakat.

Kemudian dalam mengumpulkan sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu informan yang dipilih dengan sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang diinginkan peneliti dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan. Adapun kriteria informan dalam pengukuran dampak inovasi ini, adalah :

- a. Pelaksana inovasi, merupakan orang yang melaksanakan pekerjaan baik sebelum maupun sesudah adanya inovasi, baik dari unsur pemerintahan maupun masyarakat atau LSM.

- b. Pengagas inovasi, orang atau pihak yang pertamakali memunculkan ide/gagasan inivasinya sehingga dipanang sebagai salah satu yang paling memahami program inovasi tersebut.
- c. Jajaran pimpinan OPD yang terlibat secara langsung dalam proses inovasi di lingkungannya.
- d. Penerima atau sasaran inovasi, yaitu pihak yang terlibat sebagai pengguna atau yang terdampak dari proses inovasi. Puhak ini bisa dari unsur masyarakat ataupun unsur pemerintahan.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses dan interpretasi data dari hasil pengolahan data agar memiliki makna dan informatif. Dalam penelitian ini, semua data mendalam, observasi, serta studi literatur, diolah dan dianalisis untuk kemudian disajikan secara deskriptif.

Pengolahan data Sebelum tim pengukuran melakukan proses pengumpulan data di lapangan, terlebih dahulu ditentukan lokus dan jenis inovasi yang akan dijadikan sampel. Berdasarkan hasil pengumpulan sampel yang terkait dengan jenis inovasi, Tim melakukan pengklasifikasian terhadap jenis inovasi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: Tata Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat. Selanjutnya, Proses pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui FGD dan wawancara mendalam (depth interview). Hasil wawancara diseleksi dan diambil data yang relevan dengan fokus penelitian yaitu pengukuran dampak inovasi, yang kemudian diikuti dengan pengklasifikasian data ke dalam tiga jenis inovasi yakni jenis inovasi pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan, dan inovasi pemberdayaan masyarakat.

b. Display Data

Pada tahap ini dibutuhkan pengertian yang mendalam terhadap data untuk proses penyajian data dalam bentuk tulisan, tabel, serta kutipan hasil wawancara setelah pereduksian data selesai. Kemudian dirangkum secara sistematis agar mudah difahami.

c. Verifikasi Data

Verifikasi yaitu penarikan kesimpulan terhadap kesimpulan yang telah diambil tentunya dengan data pembanding dari hasil pengumpulan data. Proses verifikasi dapat dilakukan dengan cara triangulasi, yaitu proses check dan recheck antara satu sumber dengan sumber lainnya. Pada tahap ini kategori yang telah didapat melalui analisis ditinjau kembali berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan, sehingga dapat dicocokan apakah ada kesamaan antara landasan teoritis dengan hasil yang dicapai. Walaupun penelitian ini tidak memiliki hipotesis tertentu, namun dari landasan teori dapat dibuat asumsi-asumsi mengenai hubungan antara konsep-konsep dan faktor-faktor yang ada.

Teknik Analisa Data

a. Before After Comparison

Pendekatan untuk mengukur dampak dengan cara membandingkan kondisi (orang atau penduduk suatu daerah) sebelum (before) dan sesudah (after) program inovasi (actual postprogram data). Selain itu, pendekatan ini juga dapat digunakan untuk membandingkan kondisi masyarakat sesudah program inovasi dijalankan (actual postprogram data). Adapun cara untuk melihat dampak inovasi dilakukan dengan menghitung perbandingan dari indikator input, proses, dan output berdasarkan data-data sebelum dan sesudah inovasi dilaksanakan.

Rumus persentase perubahan :

Tabel 3. Rumus prosentase perubahan adalah sebagai berikut

$\left(\frac{x - y}{y} \right) \times 100\%$	Untuk Perhitungan apabila kondisi pasca inovasi lebih kecil dibandingkan sebelum inovasi, namun menunjukkan derajat nilai perubahan Positif (efektif – efisien). Misalnya: Waktu, Jumlah SDM, Biaya.
$\left(\frac{y - x}{x} \right) \times 100\%$	Untuk Perhitungan apabila nilai pasca inovasi lebih besar dibandingkan sebelum inovasi, dan menunjukkan derajat nilai perubahan Positif. Misalnya: untuk nilai Output, produksi, dsb. Atau dengan rumus:
$\left(\frac{y}{x} \right) \times 100\%$	Untuk penghitungan nilai kinerja atau produktivitasnya.
$\bar{X} \frac{I + P + O}{3} \times 100\%$	Perhitungan Dampak Program Inovasi dihitung dari rata-rata nilai dampak Input, Proses, dan Output. Penghitungan ini dilakukan apabila data dampak yang

	ditimbulkan tidak diperoleh di dalam data lapangan.
--	---

Keterangan :

X = Keadaan sebelum inovasi

Y = Keadaan setelah Inovasi

I = Input

P = Proses

O = Output

\bar{X} = Rata - rata

b. Post Intervention Project Group

Post Intervention Project Group Post-Intervention merupakan desain evaluasi untuk mengukur dampak dengan cara menggali data setelah program dilaksanakan tanpa harus membandingkan data sebelum program dilaksanakan. Pengukuran dampak dilakukan dengan mengkombinasikan berbagai data kualitatif seperti wawancara dengan *key informan*, FGD, data-data program, dan data statistik dari instansi inovator.

IV. ANALISIS HASIL PENELITIAN

1. Berkas Atas SP2D Nyaman (BERAS NYAMAN)

1.1 Deskripsi Inovasi

Inovasi Berkas Aras SP2D Nyaman disingkat Beras Nyaman merupakan salah satu inovasi dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan khususnya Bidang Perbendaharaan yang mulai dilaksanakan/ diterapkan sejak 28 Januari 2022 sampai dengan sekarang. Inovasi termasuk pada kategori inovasi tata kelola pemerintahan dengan urusan inovasi bidang Administrasi Keuangan ang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan. Secara ringkas inovasi ini merupakan bentuk kebijakan dalam hal pemangkasan pemberkasan pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) supaya lebih efektif dan efisien, hal tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya berkas dan sulitnya pemenuhan dalam rangka proses pencairan SP2D.

Disebutkan di dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2022 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam penjabaran atas dasar aturan tersebut dapat dipisahkan antara kewenangan verifikasi pada SKPD dan Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah selaku BUD, dengan adanya hal tersebut maka dapat di ambil sebuah kebijakan yang terukur dan terarah dalam bentuk penyederhanaan dalam pemberkasan dalam pengajuan SPM (Surat Perintah Mencairkan).

Upaya nyata dalam hal mendukung program nasional dalam hal pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilaksanakan dalam berbagai aspek bidang, salah satunya adalah dengan memangkas sistem serta menyederhanakan sistem secara umum, dengan adanya hal ini dengan didasari oleh Peraturan Meneteri dalam negeri serta Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Balangan maka diambil langkah positif dalam

menyederhanakan system adminis trasi dengan memisahkan antara fungsi administrasi pada SKPD dan Bidang Perbendaharan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Balangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), dengan adanya hal tersebut maka ada kebijakan untuk menyederhanakan berkas dalam proses pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) sebagai dasar penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), sebagai bentuk penyederhanaan dalam birokrasi secara administrasi.

Permasalahan yang melatarbelakangi munculnya inovasi Beras Nyaman adalah Bergulirnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta, menindak lanjuti instruksi presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, memberi dampak yang begitu besar bagi pemerintah daerah, karena dalam hal ini Pemerintah Daerah dituntut untuk bisa melakukan penyesuaian atas sistem administrasi untuk dapat menukseskan Program Nasional dalam hal pemberantasan korupsi, menindak lanjuti hal tersebut sebagai dasar hukum Pemerintah Kabupaten Balangan Menyusun Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 sebagai dasar hukum serta sebagai dasar dalam penertiban administrasi, sehingga dengan adanya hal tersebut masing-masing penanggung jawab atas proses penatausahaan memiliki tanggung jawab masing-masing termasuk dalam hal penatausahaan atas berkas kelengkapan dalam proses belanja daerah dan dalam hal ini penertiban administrasi dalam hal proses pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk kemudian dapat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Strategi dan metode yang ditawarkan adalah bahwa sebelumnya kelengkapan berkas yang dilengkapi dalam menyampaikan SPM dalam pengajuan SP2D terlalu banyak, meliputi berkas kontrak, serta bukti dukung lainnya yang umumnya sangat banyak. Saat ini melalui inovasi Beras Nyaman bidang perbendaharan setelah dilakukan Inovasi Beras Nyaman (Berkas Atas SP2D Nyaman), melakukan **penyederhanaan dalam kelengkapan berkas** yang harus disampaikan dalam proses penyampaian SPM dalam pengajuan SP2D, dimana berkas yang masuk dalam kewenangan SKPD dalam hal verifikasi dan pengadministrasian tidak lagi

dilampirkan dalam proses pengajuan, hanya cukup dilampirkan surat pernyataan dan berkas Permohonan.

Keunggulan dan kebaharuan yang ditawarkan adalah dari Strategi Manajemen Keuangan melalui Inovasi Beras Nyaman (Berkas Atas SP2D Nyaman), berkas pengajuan tidak lagi banyak dan lebih mudah dalam hal pengarsipan, sehingga bisa meminimalisir adanya berkas yang tercecer dalam berjalannya proses pengajuan, disamping hal tersebut dalam hal pertanggungjawaban juga menjadi lebih jelas karena terdapat pemisahan kewenangan antara SKPD dan Bidang Perpendaharaan selaku Bendahara Umum Daerah. Penerapan inovasi tersebut didasarkan pada SK Bupati Balangan Nomor 1-188.45/885/KUM Tahun tanggal 19 Desember 2022 tentang SK Inovasi, Admin dan Inovator Inovasi Tahun 2022.

Inovasi Beras Nyaman melibatkan pelaksana inovasi sebanyak 37 orang yang diketuai oleh Kepala BPKPAD dan beranggotakan bendahara pengeluaran/ penerimaan seluruh SKPD di Kabupaten Balangan (Sesuai SK Kepala BPKPAD Nomor 188.45/058/SK/BPKPAF-BLG/2022 tanggal 28 Januari 2022.

TAHAPAN INOVASI

- a. Persiapan, Persiapan pertama adalah pembentukan tim yang terdiri dari BPKPAD, BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan, STIE Pancasetia Banjarmasin, Wartawan Radar Banjarmasin dan Bank Kalsel dalam penyusunan Inovasi Beras Nyaman (Berkas Atas SP2D Nyaman).
- b. Pelaksanaan, Pelaksanaan dalam Inovasi Beras Nyaman (Berkas Atas SP2D Nyaman) adalah sebagai berikut :
 - Menentukan dasar hukum dalam pengambilan kebijakan dalam menyederhanakan birokrasi administrasi dalam proses penyampaian SPM dalam Pengajuan SP2D.
 - Membuat Peraturan Bupati sebagai dasar pelaksanaan serta sebagai fungsi turunan dari Peraturan Meneteri dalam Negeri dan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan.
 - Melakukan kajian atas rancangan kebijakan bersama tim inovasi
 - Sosialisasi kepada seluruh unsur terkait.
 - Penerapan Inovasi Beras Nyaman (Berkas Atas SP2D Nyaman).

Tujuan inovasi adalah

- a. Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Bupati Daerah Kabupaten Balangan nomor 109 tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Sebagai Implementasi atas reformasi birokrasi di daerah dalam hal ini reformasi birokrasi dalam hal administrasi.
- c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
- d. Menciptakan tatakelola pemerintahan yang akuntabel.

Manfaat Inovasi Beras Nyaman adalah

- a. Terciptanya sistem administrasi pengelolaan keuangan yang akuntabel
- b. Terwujudnya sistem administrasi yang tertib, efektif dan efisien
Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan

Harapannya inovasi Beras Nyaman dapat menghasilkan sistem administrasi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan yang efektif dan efisien pada tahun anggaran selanjutnya.

1.2 Data Perubahan

Inovasi Beras Nyaman berkontribusi besar terhadap kelancaran proses keuangan dari SKPD. Berikut ini merupakan ringkasan perubahan sebelum dan sesudah ada inovasi Beras Nyaman

Variabel	Indikator	Sebelum	Sesudah	Perubahan
Input	Jumlah SDM pelaksana	Jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam menjalankan/melaksanakan inovasi Beras Nyaman 37 orang		Semakin banyak jumlah SDM pelaksana inovasi maka pengelolaan inovasi dinilai semakin baik karena inovasi semakin siap dan maksimal dalam memberikan pelayanannya
Proses	Metode mendapatkan layanan	Verifikasi berkas semua dilakukan oleh bidang Perbendaharaan BPKPAD	Berkas yang diterima BPKPAD adalah berkas yang sudah lolos verifikasi SKPD dan pejabat berwenang yang dibuktikan dengan surat pernyataan verifikasi yang	Metode memperoleh pelayanan saat ini semakin sederhana, ringkas dan murah karena jumlah berkas yang dilengkapi untuk memasukkan usulan SP2D tidak sebanyak sebelumnya.

Variabel	Indikator	Sebelum	Sesudah	Perubahan
		disahkan oleh PPK-SKPD		
Output	Waktu pelayanan	Waktu pelayanan dari penerimaan berkas permintaan pembayaran dari SKPD, sampai ke proses persetujuan dan pengesahan hingga pengarsipan berkas SP2D membutuhkan waktu maksimal 50 menit		Waktu untuk memperoleh pelayanan semakin singkat sehingga mencerminkan efisiensi dan efektivitas. Verifikasi SKPD sudah difungsikan dengan baik, hal tersebut mempersingkat proses/tahapan karena dari Bidang perpendahaan menerima berkas yang sudah lengkap, untuk kemudian dilakukan input dan pembuatan SP2D, proses verifikasi dan pengajuan persetujuan/ aproval dan dapat diproses ke Bank
	Jumlah penerima/pengguna layanan	398 orang yang terdiri dari bagian keuangan dari SKPD, kelurahan dan desa		Melalui mekanisme yang lebih mudah maka jumlah penerima manfaat semakin bertambah luas cakupan pelayanannya
Dampak	Efisiensi layanan yang dihasilkan	Berkas kelengkapan SP2D yang menjadi kewenangan SKPD sebelumnya ikut dilampirkan	cukup dilampirkan surat pernyataan dan berkas permohonan.	penyederhanaan dalam kelengkapan berkas yang harus disampaikan dalam proses penyampaian SPM dalam pengajuan SP2D, dimana berkas yang masuk dalam kewenangan SKPD dalam hal verifikasi dan pengadministrasian tidak lagi dilampirkan dalam proses pengajuan
	Jumlah stakeholder selain pemerintah yang terlibat dalam inovasi	Sebelumnya hanya melibatkan SKPD teknis, BPKPAD dan Bank Kalsel	BPKPAD, BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan, STIE Pancasetia Banjarmasin, Wartawan Radar Banjarmasin dan Bank Kalsel dalam penyusunan Inovasi Beras Nyaman (Berkas Atas SP2D Nyaman).	Jumlah stakeholder selain instansi pemerintah yang terlibat sebagai aktor inovasi turut mendorong meningkatnya pelayanan inovasi tersebut, mekanisme yang dibangun dengan link, jejaring dan kemitraan yang kuat antar banyak aktor akan semakin kuat

Sumber: BPKPAD Kabupaten Balangan, tahun 2023

1.3 Analisis Dampak

Penyederhanaan proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana merupakan upaya mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi dalam rangka pengeluaran dana oleh pemerintah. Langkah-langkah yang dapat dilakukan terdiri dari :

- Evaluasi dan Riset: Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penerbitan SP2D yang sedang berlangsung. Identifikasi setiap tahap, persyaratan, dan prosedur yang diperlukan. Selanjutnya, lakukan riset untuk mengidentifikasi area-area di mana proses tersebut dapat disederhanakan.
- Simplifikasi Persyaratan: Evaluasi persyaratan yang diperlukan untuk penerbitan SP2D. Identifikasi persyaratan yang tidak efektif atau berlebihan. Upayakan untuk mengurangi jumlah dan kompleksitas persyaratan yang tidak perlu, sehingga mempermudah proses administrasi. Dalam hal ini inovasi Beras Nyaman mengurangi berkas permohonan SP2D menjadi cukup surat pernyataan dan berkas permohonan. Berkas yang menjadi kewenangan SKPD sudah diserahkan verifikasi nya di SKPD pengusul.
- Otomatisasi Proses: Manfaatkan teknologi dan sistem informasi yang sesuai untuk otomatisasi proses penerbitan SP2D. Implementasikan sistem yang dapat mengintegrasikan data secara efisien, mengurangi kesalahan manusia, dan mempercepat alur persetujuan dan penyelesaian penerbitan SP2D. Dibuktikan dengan proses dan alur melalui satu pintu/ loket dan relatif singkat yakni memerlukan waktu maksimal 50 menit. Penginputannya pun melalui aplikasi pusat yang dipergunakan secara nasional yakni <https://balangankab.sipd.kemendagri.go.id/siap/spm/verifikasi>. Melalui aplikasi tersebut akan diupload dokumen SPM-LS, surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Pengguna Anggaran, dan surat pernyataan verifikasi oleh PPK SKPD. Untuk kemudian terdapat pilihan disetujui/tidak
- Koordinasi Antar Instansi: Perkuat koordinasi dan komunikasi antara instansi yang terlibat dalam proses penerbitan SP2D. Membangun

mekanisme koordinasi yang baik akan mempercepat aliran informasi, meminimalkan tumpang tindih tugas, dan memastikan keterpaduan dalam proses penerbitan SP2D. Inovasi Beras Nyaman mengaktifkan kembali fungsi verifikasi dari SKPD pengusul terhadap berkas yang menjadi kewenangan SKPD pengusul, terdapat pemetaan tugas yang jelas antar jejaring inovasi.

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi petugas yang terlibat dalam penerbitan SP2D. Dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, petugas akan lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas mereka, serta mampu menghadapi perubahan dan tuntutan baru dalam proses penerbitan SP2D. Peningkatan kapasitas SDM pelaksana inovasi Beras Nyaman telah dilaksanakan melalui Workshop Penatausahaan Keuangan Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati nomor 109 Tahun 2022 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pemantauan dan Evaluasi: Lakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses penerbitan SP2D yang telah disederhanakan. Identifikasi masalah yang muncul dan upayakan untuk terus memperbaiki proses agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara internal telah dilaksanakan oleh BPKPAD dengan hasil identifikasi kekurangan inovasi yakni
 - Perlunya pengembangan menuju aplikasi dalam hal pengajuan berkas SP2D
 - Perlu adanya sarana prasarana dalam memonitoring alur SP2D
 - Harus ada pengembangan berkas yang awalnya berupa harcopy menjadi softcopy dalam pengajuan pencairan SP2D

Selain melaksanakan survei internal, BPKPAD juga melaksanakan survei kepuasan masyarakat/ jejak pendapat terhadap 81 orang dalam rangka meningkatkan pelayanan dari program inovasi Beras Nyaman dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- a. 68 orang atau 84% responden menyatakan puas/ bahwa akses infromasi tentang prosedur layanan Beras Nyaman mudah diperoleh dan diakses, sedangkan sisanya 13% menyatakan kurang puas.
- b. Sebanyak 56 orang responden atau 69,1 orang menyatakan puas terhadap standar waktu yang ditetapkan dalam memberikan pelayanan, yang mana artinya pemberian pelayanan penerbitan SP2D oleh BPKPAD tidak memakan waktu lama/ relatif singkat dan tepat waktu.
- c. Pada aspek pemberian informasi terkait persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan SP2D sebanyak 72 orang (88,9%) responden menyatakan puas dan mendapatkan informasi yang mudah dan lengkap serta persyaratan mudah dipenuhi.
- d. Sebanyak 70 orang (86,4%) menyatakan puas terhadap implementasi yakni perubahan dan pemberkasan semakin memberikan kemudahan dalam proses pengajuan SP2D. Namun masih terdapat 4 orang (4,9%) yang menyatakan tidak puas.
- e. Pada aspek media komunikasi untuk penyampaian keluhan sebanyak 76 orang (93,8%) menyatakan puas karena selama ini dari BPKPAD memberikan link email, WA group dan facebook untuk koordinasi teknis terkait penatausahaan keuangan.

Mempertimbangkan kekurangan dari inovasi Beras Nyaman dan dalam rangka meningkatkan pelayanan penerbitan SP2D terdapat beberapa inovasi yang diadopsi dan terapkan yakni :

- **Penerbitan SP2D Otomatis**, Mengimplementasikan sistem otomatisasi yang dapat menghasilkan SP2D secara langsung setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan SP2D dapat dikurangi secara signifikan.
- **Verifikasi Digital**, Menggunakan teknologi verifikasi digital, seperti tanda tangan elektronik atau sertifikat digital, untuk memverifikasi dokumen dan persetujuan yang diperlukan dalam proses penerbitan SP2D. Ini memungkinkan penggunaan dokumen digital yang aman dan mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik.
- **Sistem Notifikasi dan Pemantauan**, Menerapkan sistem notifikasi otomatis yang memberikan pembaruan langsung kepada pemohon

mengenai status permohonan SP2D. Selain itu, sistem pemantauan dapat digunakan untuk melacak dan memantau setiap tahap proses penerbitan SP2D, sehingga pemohon dapat mengetahui perkembangan dan waktu penyelesaian.

- **Layanan Konsultasi Online**, Menyediakan layanan konsultasi online kepada pemohon untuk membantu memahami persyaratan dan prosedur penerbitan SP2D. Dengan adanya dukungan online, pemohon dapat mengajukan pertanyaan dan mendapatkan bantuan langsung, sehingga meminimalkan kesalahan dan mempercepat proses.
- **Peningkatan Sistem Informasi**, mengintegrasikan sistem informasi yang lebih baik antara instansi terkait dalam proses penerbitan SP2D. Hal ini memungkinkan pertukaran data yang lebih efisien dan meningkatkan koordinasi antarinstansi, sehingga mengurangi kesalahan dan waktu penyelesaian.
- **Layanan Berbasis Self-Service**, menyediakan portal atau aplikasi self-service yang memungkinkan pemohon untuk mengisi formulir, mengunggah dokumen, dan melacak status permohonan secara mandiri. Dengan adanya layanan self-service, pemohon dapat mempercepat proses dan mengurangi interaksi langsung dengan petugas.
- **Analisis Data dan Kecerdasan Buatan**, menerapkan analisis data dan teknik kecerdasan buatan untuk melakukan prediksi waktu penyelesaian dan mengidentifikasi potensi hambatan atau masalah dalam proses penerbitan SP2D. Dengan demikian, dapat dilakukan perencanaan yang lebih baik dan tindakan yang proaktif untuk mengoptimalkan proses.
- **Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas**, melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi petugas yang terlibat dalam penerbitan SP2D. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang ditingkatkan, petugas akan lebih efektif dalam menjalankan tugas mereka dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pemohon.

Penerapan inovasi-inovasi ini dapat membantu mempercepat proses penerbitan SP2D, menyederhanakan birokrasi, meningkatkan transparansi, dan memberikan pelayanan yang lebih efisien kepada pemohon.

2. Balangan Pasar Murah Untuk Rakyat (BAPAMU KUAT)

2.1 Deskripsi Inovasi

Inovasi Balangan Pasar Murah Untuk Rakyat (BAPAMU KUAT) merupakan salah satu inisiatif dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil/ Mikro dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mulai dilaksanakan sejak 1 Januari 2022. Inovasi tersebut termasuk kategori inovasi pelayanan publik. Inovasi BAPAMU KUAT adalah melaksanakan kegiatan pasar murah secara mandiri dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Balangan dalam rangka menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Selain itu apabila dikaitkan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting disebutkan bahwa kebijakan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting telah menjadi program strategis nasional. Dalam rangka mengendalian ketersediaan dan kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya secara mandiri atau bersama-sama bertugas meningkatkan dan melindungi produksi; mengembangkan sarana produksi; mengembangkan infrastruktur; membina pelaku usaha; **mengembangkan sarana perdagangan;** mengoptimalkan perdagangan antar pulau; **melakukan pemantauan dan pengawasan harga;** mengembangkan informasi komoditi secara nasional; **mengelola stok dan logistik;** meningkatkan kelancaran arus distribusi; mengelola impor dan ekspor; dan menyediakan subsidi ongkos angkut di daerah terpencil, terluar dan perbatasan.

Sebagaimana diketahui bahwa seiring dengan semakin meningkat dan tingginya harga beberapa komoditas barang kebutuhan pokok dipasaran, terutama saat akhir tahun 2021 hingga tahun 2022, terutama minyak goreng, gula putih, bawang merah yang mengalami kenaikan cukup signifikan bahkan mengalami kekosongan stok di pasaran (pasar tradisional) di Kabupaten Balangan. Sehingga dirasa perlu untuk melakukan kegiatan pasar murah yang kontinyu secara mandiri tidak selalu bergantung pada kegiatan pasar murah yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan agar masyarakat kalangan menengah kebawah yang terkena dampak kenaikan barang secara langsung bisa terbantu.

Selain itu juga untuk menekan tingkat inflasi di Kabupaten Balangan. agar masyarakat bisa terbantu baik disaat kenaikan harga barang kebutuhan pokok maupun menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Kegiatan Pasar Murah yang awalnya tergantung pada kegiatan Dinas Perdagangan Propinsi Kalimantan Selatan, dirasa perlu untuk melakukan secara mandiri kegiatan pasar murah tersebut dengan menggandeng beberapa distributor yang ada di Balangan, maupun distributor yang ada Barabai dan di Banjarmasin

Metode yang digunakan adalah metode pelayanan publik secara langsung, atau mendekatkan pasar murah dengan konsumen/ masyarakat. Adapun strategi yang dilakukan adalah :

- membuat perencanaan pasar murah dihari hari besar keagamaan Nasional, ketika harga bahan pokok mulai naik
- melakukan konsultasi dan masukan dengan kepala skpd terhadap kegiatan yang akan dilakukan
- koordinasi dengan pihak Kecamatan, Desa maupun SKPD lain yang terlibat
- koordinasi dengan para distributor

Beberapa manfaat dari kegiatan pasar murah yakni sebagai berikut:

- Masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan disaat harga mulai naik
- Menekan tingkat inflasi daerah

Teknis pelaksanaan inovasi BAPAMU KUAT adalah sebagai berikut :

- a. Bersama dengan Kabid melakukan Koordinasi kepada Kepala Dinas terkait dengan rencana Pasar Murah untuk menentukan jadwal dan lokasi Pasar Murah.
- b. Koordinasi dengan Camat terkait rencana Pasar Murah yang telah direncanakan dengan Kepala Dinas.
- c. Koordinasi dengan Kepala Desa terkait locus Pasar Murah.
- d. Menyiapkan Administrasi Pasar Murah.
- e. Medistribusikan Surat Menyurat Pasar Murah kepada Kepala Daerah, institusi, Agen, komunitas, Mediamasa.
- f. Pelaksanaan Pasar Murah.
- g. Membuat laporan hasil kegiatan.
- h. Membuat Evaluasi Kegiatan.

2.2 Data Perubahan

Tabel 4. Perubahan Inovasi BAPAMU KUAT

Indikator	Deskripsi Perubahan
Kemudahan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting	Kebijakan Pemkab Balangan yang diambil dalam rangka memudahkan akses masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok yang harganya baik karena kondisi dan peristiwa tertentu adalah melalui pasar murah. Inovasi Pasar murah mandiri lebih fleksibel jadwal dan lokasi pelaksanaan sesuai kebutuhan/ permintaan desa (jangkauan lebih luas dan intensitas lebih sering) dan dapat menjangkau masyarakat daerah terpencil. Jumlah pelaku ekonomi lokal Kabupaten Balangan yang dilibatkan semakin banyak, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi UMKM.
Intensitas pelaksanaan pasar murah	Berkurangnya ketergantungan pelaksanaan dan inovasi BAPAMU KUAT terhadap jadwal oleh Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel menjadikan lebih fleksibel jadwal dan intensitas pelaksanannya. Pada tahun 2021 selain faktor covid 19 Pasar Murah dilaksanakan sebanyak 3 kali, pada tahun selanjutnya direncanakan dilaksanakan sebanyak 38 kali dalam 1 tahun
Dampak terhadap stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi	Harga bahan pokok dan bahan penting yang disediakan melalui inovasi BAPAMU KUAT memiliki selisih dibandingkan harga yang dijual di pasaran, dengan selisih harga yang sesuai dengan daya beli mayoritas pengunjung/ masyarakat dapat dihitung keuntungan ekonomi yang dirasakan pengunjung/ masyarakat, penyedia (produsen, agen, distributor, pelaku usaha/UMKM lokal). Lama waktu harga bisa ditekan menjadi lebih stabil dan terjangkau bisa dijadikan salah satu indikator keberhasilan program inovasi.

Indikator	Deskripsi Perubahan
Jumlah pengunjung	Peningkatan jumlah penerima manfaat/ pengunjung inovasi BAPAMU KUAT menunjukkan keberhasilan dari program inovasi. Dengan asumsi semakin sering/banyak intensitas kegiatan inovasi pasar murah yang dilaksanakan dengan lokasi kegiatan tersebut di kecamatan di Kabupaten Balangan tentunya jumlah pengunjung dan penerima manfaatpun semakin banyak. Dalam kurun waktu tahun 2022 sebanyak 10 kali pelaksanaan pasar murah diantaranya di Desa Teluk Masjid Batumandi, Muara Ninian Juai, Mantuan Halong, Desa Baruh Bahinu Dalam Paringin Selatan, Kecamatan Lampihon, Putat Basiun Awayan, Tebing Tinggi, Sungai Ketapi Paringin, Sungsum Tebing Tinggi dan Puyun Halong total kunjungan adalah 225 orang.
Jalinan kemitraan dengan Dinas Perdagangan Provinsi, distributor barang, pelaku usaha lokal	Pelaksanaan program inovasi BAPAMU KUAT yang banyak melibatkan partisipasi produsen, agen, distributor dan pedagang/ pengusaha lokal memberikan manfaat peningkatan perolehan keuntungan produsen/ agen/ distributor serta menunjang tumbuh dan berkembangnya UMKM lokal Kabupaten Balangan.
Efisiensi operasional	Bahwa melalui terlaksananya program inovasi BAPAMU KUAT akan terjadi efisiensi operasional karena lokasi penyelenggaraan pasar murah adalah mendekati konsumen/ masyarakat yang membutuhkan dan direncanakan tersebut di seluruh kecamatan Kabupaten Balangan, secara tidak langsung selama ini untuk memperoleh bahan kebutuhan pokok dan penting sebagian masyarakat masih harus menempuh jarak tempuh yang jauh, dan dimananya biaya transportasi dalam pendistribusian dan pemasaran menyebabkan harga bahan kebutuhan pokok dan penting menjadi meningkat.

2.3 Analisis Dampak

Berdasarkan Perpres Nomor 71 Tahun 2020 barang kebutuhan pokok terdiri dari barang kebutuhan pokok pertanian (beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabai, bawang merah), barang kebutuhan pokok hasil industri (gula, minyak goreng dan tepung terigu), barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan (daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar), sementara untuk barang kebutuhan penting adalah terdiri dari benih padi, jagung dan kedelai; pupuk; gas elpiji; triplek; semen; besi baja konstruksi dan baja ringan. Terhadap barang pokok dan penting tersebut pemerintah pusat dan daerah perlu dikendalikan dalam jumlah yang

memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau. Apabila terdapat kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan pemerintah pusat wajib

Program pengendalian harga komoditas barang pokok dan barang penting merupakan langkah yang dapat diambil pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi kepentingan konsumen. Berikut adalah beberapa contoh program yang dapat dilakukan dalam pengendalian harga komoditas barang pokok dan barang penting:

- a. Penetapan Harga Maksimum: Pemerintah dapat menetapkan batas harga maksimum untuk komoditas barang pokok dan barang penting. Hal ini dilakukan untuk mencegah peningkatan harga yang tidak wajar dan menjaga harga tetap terjangkau bagi konsumen. Penetapan harga maksimum harus didasarkan pada analisis yang cermat terhadap biaya produksi, distribusi, dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
- b. Subsidi Harga: Pemerintah dapat memberikan subsidi harga kepada konsumen untuk barang pokok dan barang penting tertentu. Subsidi ini bertujuan untuk menurunkan beban harga yang harus ditanggung konsumen, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Subsidi dapat diberikan dalam bentuk langsung, seperti bantuan tunai, atau melalui program kartu subsidi.
- c. Peningkatan Produksi dan Distribusi: Pemerintah dapat mendorong peningkatan produksi dan distribusi barang pokok dan barang penting dengan memberikan insentif kepada produsen dan distributor. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pasokan barang sehingga dapat mengurangi permintaan yang tinggi dan menjaga harga tetap stabil. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan produsen dan distributor untuk meningkatkan efisiensi dalam rantai pasok.
- d. Peningkatan Persaingan dan Transparansi: Pemerintah dapat memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap praktik monopoli atau oligopoli yang dapat menyebabkan kenaikan harga barang pokok dan barang penting. Selain itu, mendorong persaingan yang sehat dan transparansi dalam pasar dapat membantu menjaga harga tetap kompetitif dan mengurangi potensi penyalahgunaan harga.

- e. Pengawasan dan Penindakan: Pemerintah perlu melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku usaha yang melakukan praktik spekulasi harga, penimbunan barang, atau manipulasi pasar. Tindakan tegas harus diambil terhadap pelaku yang melanggar aturan untuk memastikan harga barang pokok dan barang penting tetap adil dan terjangkau bagi konsumen.
- f. Peningkatan Literasi Konsumen: Pemerintah dapat meningkatkan literasi konsumen mengenai hak dan perlindungan konsumen, termasuk informasi tentang harga barang pokok dan barang penting. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang harga dan mekanisme pasar, konsumen dapat membuat keputusan yang cerdas dalam pembelian dan menghindari praktik penipuan atau eksplorasi.

Pasar murah yang disediakan oleh pemerintah daerah adalah suatu kegiatan atau acara yang diorganisir oleh pemerintah setempat untuk memberikan aksesibilitas ekonomi kepada masyarakat dengan menyediakan produk dengan harga yang lebih terjangkau. Pemerintah daerah bekerja sama dengan produsen, distributor, dan penjual lokal untuk menawarkan produk dengan harga diskon atau lebih rendah dari harga pasar.

Pasar murah yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat diadakan dalam bentuk bazar, pasar swalayan sementara, atau acara khusus lainnya. Pemerintah daerah biasanya berperan sebagai penyelenggara acara dan mengkoordinasikan partisipasi produsen dan penjual lokal untuk menawarkan produk dengan harga terjangkau kepada masyarakat.

Tujuan utama dari pasar murah yang disediakan oleh pemerintah daerah adalah untuk membantu masyarakat dengan pendapatan terbatas memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan biaya yang lebih rendah. Pasar murah ini dapat menawarkan berbagai jenis produk, seperti bahan makanan, pakaian, alat-alat rumah tangga, barang kebutuhan sehari-hari, dan produk lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pasar murah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah juga dapat memberikan stimulus ekonomi bagi produsen dan penjual lokal, mendorong pertumbuhan sektor usaha lokal, dan menciptakan peluang kerja di tingkat lokal. Selain itu, pasar murah ini juga dapat berfungsi sebagai platform untuk menyampaikan informasi, penyuluhan, atau edukasi kepada

masyarakat mengenai hak dan perlindungan konsumen, pentingnya memilih produk berkualitas, dan pengelolaan keuangan yang bijak.

Pasar murah yang disediakan oleh pemerintah daerah biasanya dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan sosial, perayaan, atau dalam situasi tertentu seperti menjelang hari raya atau perayaan khusus lainnya. Informasi mengenai jadwal, lokasi, dan jenis produk yang ditawarkan biasanya diumumkan melalui saluran komunikasi resmi pemerintah daerah, seperti pengumuman di media massa, situs web pemerintah, atau media sosial resmi pemerintah daerah.

Pasar murah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat memberikan sejumlah manfaat kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa manfaat pasar murah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah:

- a. Aksesibilitas Ekonomi: Pasar murah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah memiliki tujuan untuk memberikan aksesibilitas ekonomi kepada masyarakat dengan pendapatan terbatas. Dengan menyediakan produk dengan harga yang lebih terjangkau, pasar murah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan biaya yang lebih rendah.
- b. Peningkatan Daya Beli: Pasar murah dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat dengan menawarkan produk dengan harga diskon. Dengan membeli barang dengan harga yang lebih rendah, masyarakat dapat menghemat uang dan menggunakan sisa dana untuk kebutuhan lainnya.
- c. Diversifikasi Pilihan: Pasar murah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat memperluas pilihan produk yang tersedia bagi masyarakat. Hal ini memberikan konsumen lebih banyak opsi dalam memilih produk dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau.
- d. Stimulus Ekonomi Lokal: Pasar murah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat memberikan stimulus ekonomi di tingkat lokal. Dengan mengundang produsen dan penjual lokal untuk berpartisipasi, pasar murah dapat mendorong pertumbuhan sektor usaha lokal dan menciptakan peluang kerja bagi masyarakat setempat.
- e. Pengurangan Pemborosan dan Limbah: Pasar murah dapat membantu mengurangi pemborosan dan limbah dengan mempromosikan pembelian

dan penggunaan kembali produk yang lebih terjangkau. Dengan membeli produk dengan harga diskon, masyarakat lebih cenderung memanfaatkan barang tersebut secara efektif dan mengurangi pembuangan yang tidak perlu.

- f. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Pasar murah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah memiliki dampak positif pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi dengan mendapatkan barang dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga mengurangi beban finansial dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
- g. Penyuluhan dan Pendidikan Konsumen: Selain menyediakan produk dengan harga terjangkau, pasar murah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah juga dapat menyediakan kegiatan penyuluhan dan pendidikan konsumen. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan literasi konsumen, memberikan informasi tentang hak konsumen, keaslian produk, dan pentingnya memilih produk yang berkualitas.

Pasar murah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menjadi salah satu upaya dalam memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat dengan pendapatan terbatas, merangsang pertumbuhan ekonomi lokal, dan mengurangi pemborosan.

Kedepannya dalam rangka mengukur keberhasilan program pasar murah (inovasi BAPAMU KUAT) yang diselenggarakan oleh pemerintah, dapat dilakukan beberapa langkah evaluasi dan pengukuran melalui beberapa cara mengukur yakni :

- a. Mendata Jumlah Partisipasi: Mengukur jumlah orang atau rumah tangga yang mengunjungi pasar murah adalah salah satu indikator keberhasilan. Jika partisipasi tinggi, ini menunjukkan bahwa program berhasil menarik minat masyarakat dan memberikan manfaat bagi mereka.
- b. Penilaian Kepuasan Konsumen: Melakukan survei atau wawancara kepada konsumen yang mengunjungi pasar murah untuk mengetahui tingkat kepuasan mereka. Pertanyaan dapat berkaitan dengan harga produk, kualitas barang, variasi produk, pelayanan pelanggan, dan lain-lain. Dengan mengumpulkan masukan dari konsumen, pemerintah dapat mengevaluasi sejauh mana program pasar murah memenuhi kebutuhan

dan harapan masyarakat. Hal ini telah dilaksanakan oleh Dinas Koperindag dengan membagi kuesioner kepada penerima manfaat. Sebagai contoh adalah pertanyaan terkait dengan perbandingan harga, pemberian pelayanan, cara mengetahui inovasi BAPAMU KUAT, kecukupan kelengkapan dan varian barang kebutuhan pokok dan penting yang dijual, serta kebutuhan terhadap pelaksanaan pasar murah di daerah responden. Dari penjaringan kuesioner tersebut diperoleh hasil bahwa mayoritas memberikan respon positif karena merasa baik, cukup puas, dan perlu untuk dilaksanakan pasar murah.

- c. Pengukuran Dampak Ekonomi: Menganalisis dampak ekonomi dari program pasar murah, seperti pengeluaran konsumen yang meningkat, peningkatan penjualan untuk produsen lokal, atau peningkatan pendapatan pedagang. Dampak ini dapat diukur dengan membandingkan data sebelum dan setelah pelaksanaan program atau dengan mengumpulkan data langsung dari para pihak yang terlibat.
- d. Penilaian Harga dan Keberlanjutan: Mengamati dampak program terhadap harga produk di pasar secara keseluruhan. Jika program mampu menahan atau menurunkan harga produk secara signifikan, ini menunjukkan keberhasilan dalam memberikan aksesibilitas ekonomi kepada masyarakat. Selain itu, mempertimbangkan keberlanjutan program pasar murah dari tahun ke tahun juga penting untuk menilai keberhasilannya dalam jangka panjang.
- e. Evaluasi Partisipasi Produsen dan Penjual Lokal: Mengukur tingkat partisipasi dan keuntungan yang diperoleh oleh produsen dan penjual lokal yang berpartisipasi dalam program pasar murah. Jika program mampu meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan bisnis mereka, ini menunjukkan keberhasilan dalam mendukung sektor usaha lokal.
- f. Evaluasi Efisiensi Operasional: Mengukur efisiensi operasional program pasar murah, termasuk pengelolaan logistik, distribusi produk, sistem pembayaran, dan infrastruktur pendukung lainnya. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program.
- g. Analisis Dampak Sosial: Melakukan analisis dampak sosial dari program pasar murah, seperti peningkatan akses masyarakat terhadap kebutuhan

dasar, pengurangan kemiskinan, pengurangan pemborosan makanan, atau peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membeli produk berkualitas.

Pengukuran keberhasilan program pasar murah pemerintah dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode-metode di atas. Penyebarluasan informasi program inovasi BAPAMU KUAT semakin ditingkatkan lagi dari sebelumnya berdasarkan informasi media pemerintahan, saat ini sudah semakin luas yakni media baliho/ spanduk kegiatan, media berita online dan menggunakan media sosial (Facebook, Instagram) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan. Termasuk penggunaan media whatsapp sebagai media penyelesaian permasalahan dan komunikasi dengan pengguna inovasi.

Gambar 2. Baliho Pasar Murah dan Tangkapan Layar Whatsapp



3. Data Kabupaten Untuk Perencanaan Pembangunan (DAKU KEREN)

3.1 Deskripsi Inovasi

Inovasi DAKU KEREN adalah inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo dan khususnya Bidang Statistik dan Persandian, waktu implementasi inovasi tersebut sejak 26 Nopember 2022. Pada intinya inovasi DAKU KEREN menyajikan data untuk perencanaan pembangunan di dalam wadah website aplikasi portal data <https://dakukeren.balangankab.go.id>. Adapun yang melatarbelakangi inovasi tersebut adalah semakin tumbuhnya

kesadaran akan pentingnya data dalam setiap tahapan pembangunan dan pelayanan publik hingga saat ini menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawarkan lagi. Namun kenyataannya sampai dengan sekarang ini, permasalahan data tetap saja tak terpecahkan juga. Beberapa permasalahan tersebut, diantaranya adalah:

- a. Masih sulitnya mencari data pemerintah;
- b. Adanya perbedaan data statistik antar instansi;
- c. Terdapat perbedaan konsep dan definisi tanpa adanya metadata; dan
- d. Tidak adanya kode referensi.

Kesadaran satu data tersebut sebagai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) sebagai wujud untuk mengatur tentang tata kelola data pemerintah sehingga dapat menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antara instansi Pusat dan instansi Daerah.

Dalam pelaksanaan di daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga telah menerbitkan kebijakan terkait data yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 078 Tahun 2021 tentang Satu Data, semakin meyakinkan bahwa tata kelola data pemerintahan merupakan sebuah keharusan yang tidak bisa ditawarkan lagi.

Kabupaten Balangan demikian pula. Dengan mengacu kepada peraturan tersebut diatas, maka diterbitkan pula Peraturan Bupati Balangan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Balangan yang dalam pelaksanaannya diterjemahkan kedalam Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/658/Kum Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Balangan. Data adalah hal yang sangat diperlukan sekarang ini. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa, masih ditemukan adanya banyak data yang berbeda. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan dalam mempersepsi data itu sendiri. sehingga terdapat banyak data yang memiliki makna yang tidak seragam baik berupa pengertian, satuan, referensi dan lain sebagainya.

Kesadaran akan pentingnya data dalam perencanaan dan pengambilan untuk itu diperlukan pengelolaan data akurat, mutakhir,

terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. DAKU KEREN (data kabupaten untuk perencanaan pembangunan) merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dengan adanya daku keran, maka data yang ada di Kabupaten Balangan yang diperlukan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan baik pemerintah ataupun swasta dan masyarakat umum dapat disediakan dengan akses kapan saja dan di mana saja,

Gambar 3. Tangkapan Layar Website dakukeren.balangankab.go.id



3.2 Data Perubahan

Tabel 5. Perubahan Inovasi DAKU KEREN

Indikator	Deskripsi Perubahan
Kebaruan dalam penyediaan satu data	Amanat satu data oleh pemerintah pusat dan provinsi telah ditindaklanjuti dengan pembentukan Forum Satu Data (sesuai SK Bupati Balangan Nomor 188.45/658/Kum tahun 2022 dan kemudian Inovasi DAKU KEREN. Keungulan dan kebaruan dari inovasi satu data ini diantaranya adalah : 1) Tersedianya portal resmi statistik sektoral resmi yang mampu menyediakan data sesuai standar data sehingga tidak saja bisa digunakan untuk tingkat daerah dalam perencanaan pembangunan, pendidikan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Namun juga dapat digunakan oleh instansi vertikal dan organisasi pemerintahan diatasnya; 2) Tersedianya media berbagi pakai data statistik sektoral antar organisasi pemerintah di Kabupaten Balangan; 3) Tersedianya sarana pemantauan, pembinaan, penetapan kebijakan, dan

Indikator	Deskripsi Perubahan
	<p>evaluasi terkait pengembangan dan standar data;</p> <p>4) Data statistik sektoral lebih mudah didapatkan kapan saja dan dimana saja dan kapan saja;</p> <p>5) Terpenuhinya penyelenggaraan pengelolaan statistik sektoral dengan baik;</p> <p>6) Terselenggaranya pelaksanaan Satu Data Indonesia di Kabupaten Balangan.</p>
Dokumen terdigitalisasi	Jika sebelumnya data statistik yang diperlukan untuk analisis perencanaan pembangunan adalah berupa data manual/ fisik. Maka melalui inovasi DAKU KEREN telah menjadi media penyimpanan dokumen dan data digital untuk kemudian bisa diakses pengguna. Sampai dengan saat ini jumlah data set adalah 105 dari 25 SKPD produsen data. DAKU KEREN membagi menjadi 8 aspek yakni lain-lain, kesehatan, infrastruktur, sosial budaya, ekonomi, hukum dan HAM serta hasil survei 2022. Masing-masing data dapat diunduh dalam bentuk excel
Kemudahan masyarakat	Cukup menggunakan perangkat laptop, PC dan smart phone penerima manfaat inovasi (SKPD teknis dan perencanaan, masyarakat) dapat mengakses data perencanaan dari website aplikasi DAKU KEREN
Peningkatkan jumlah pengakses data statistik perencanaan pembangunan/ pengunjung portal satu data DAKU KEREN	Sebelum adanya portal satu data website aplikasi DAKU KEREN pengguna data statistik mengakses melalui koordinasi tatap muka dan saling berkirim data. Namun dengan adanya inovasi DAKU KEREN masyarakat maupun pengguna data perencanaan pembangunan dapat langsung mengakses data secara online dimanapun dan kapanpun melalui website aplikasi https://dakukeren.balangankab.go.id , dengan jumlah pengunjung pada minggu ini adalah 74 pengunjung, sehingga total sudah terdapat 349 pengunjung.
Efisiensi Waktu dan biaya akses	Saat sebelum ada inovasi DAKU KEREN waktu terpakai untuk melakukan perjalanan menuju bidang Statistik dan Persandingan Dinas Kominfoan untuk mengantar surat permintaan data, berkonsultasi hingga mendapatkan data, sekarang dengan adanya inovasi DAKU KEREN data yang diperlukan dapat diperoleh (meminta data, mencari data di dalam DAKU KEREN, menyalin atau mengunduh) dalam waktu 30 menit sebagaimana tergambaran di dalam SOP dari inovasi.
Perubahan pola pikir	Inovasi turut merubah pola pikir pengelola, jejaring, aktor, SKPD pengguna dan masyarakat umum sebagai pengakses data semakin sadar dan tertib dalam penyimpanan data statistik perencanaan. Secara tidak langsung inovasi ini menambah motivasi dan mengedukasi baik terhadap kesadaran, metode penyimpanan, metode mengakses dan tukar menukar data statistik digital.

Indikator	Deskripsi Perubahan
Keamanan dokumen	Sebelum inovasi data fisik/ manual disimpan di sebuah tempat yang semakin lama terbatas kemampuan penyimpanannya dan tidak mungkin ditambah lagi, dokumen data pun lebih cepat rusak dan resiko hilang yang cukup besar. Sementara data digital penyimpanan adalah terpusat dalam server dan secara berkala dilakukan backup data sehingga memperkecil resiko rusak dan hilang, dengan kapasitas penyimpanan sangat besar dan waktu tidak terbatas.

Sumber : Hasil Analisis, 2022

3.3 Analisis Dampak

Inovasi DAKU KEREN diawali dengan pembentukan kelembagaan yakni Forum Satu Data dengan tugas fungsi yakni

1. Menyusun rencana kerja forum satu data dengan menggunakan indikator dan target terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan forum satu data;
2. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data yang dibutuhkan guna lebih meningkatkan pemanfaatan data bagi perencanaan pembangunan daerah
4. Menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber dari setiap sektor
5. Menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh setiap sektor untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Di dalam kelembagaan satu data terdapat pengarah, pembina tugas, koordinator, walidata, tim sekretariat, dan produsen data. Walidata adalah dari Dinas Kominfo yang bertugas

1. Mengumpulkan, memeriksa dan mengolah data berdasarkan prinsip satu data Indonesia
2. Menyebarluaskan data metadata kode referensi dan data induk diportal satu data indonesia
3. Pembantu pembina data dalam membina produsen data

Produsen data terdiri dari 34 SKPD dan kecamatan, adapun tugas produsen data adalah a) menyampaikan data dan metadata ke walidata; b) memberi masukan mengenai standar data metadata dan interoperabilitas data dan menghasilkan data sesuai prinsip satu data indonesia.

Inovasi DAKU KEREN yakni salah satu bentuk inovasi satu data yang mana seperti diketahui program satu data sendiri memberikan manfaat untuk

- a. Efisiensi operasional, program satu data memungkinkan pengumpulan, pengintegrasian, dan analisis data dari berbagai sumber yang berbeda menjadi satu sumber data tunggal. Hal ini mengurangi duplikasi data, kecacuan, dan kesalahan dalam proses pengolahan data. Dengan adanya program satu data, pemerintah dapat menghemat waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk mengelola data.
- b. Pengambilan keputusan yang lebih baik, dengan menggabungkan dan menganalisis data dari berbagai produsen data/ SKPD dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Balangan, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dan strategi perencanaan yang lebih efektif dan logis.
- c. Analisis yang mendalam, program satu data memfasilitasi analisis yang lebih mendalam dan komprehensif dari data. Dengan mengintegrasikan berbagai sumber data, program satu data membantu dalam mengidentifikasi tren, pola, dan informasi yang tidak tampak apabila data dianalisis secara terpisah. Ini memungkinkan pengguna data untuk menggali informasi berharga dan membuat keputusan yang didasarkan pada bukti yang kuat.
- d. Peningkatan efektivitas layanan pelanggan, dimana dengan program satu data, pemerintah dapat memiliki pandangan yang lebih lengkap tentang pengguna layanan. Data pengguna layanan yang terkumpul dari berbagai saluran dan interaksi dapat digunakan untuk memahami preferensi, kebutuhan, dan perilaku pelanggan dengan lebih baik. Hal ini memungkinkan pemberi layanan untuk memberikan layanan kepada penerima layanan yang lebih personal, relevan, dan efektif.
- e. Keamanan data yang ditingkatkan, program satu data dapat memperkuat keamanan data dengan mengonsolidasikan data ke satu tempat. Dengan adanya kontrol akses yang ketat, perlindungan data

yang lebih baik, dan pemantauan yang lebih terpusat, risiko kebocoran atau penyalahgunaan data dapat diminimalkan. Hal ini sangat penting mengingat pentingnya privasi dan keamanan data di era digital saat ini.

- f. Inovasi dan pengembangan produk, program satu data memungkinkan tim pengembangan produk atau penelitian untuk mengakses data yang komprehensif dan terintegrasi. Dengan memanfaatkan data ini, penyedia pelayanan sebagai inovator dapat mengidentifikasi peluang baru, tren pasar, dan kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi. Informasi ini dapat digunakan untuk inovasi produk baru, pengembangan layanan, dan strategi pemasaran yang lebih efektif.

Bentuk media inovasi dari inovasi DAKU KEREN sebagaimana disebutkan diatas adalah melalui Portal web aplikasi data, dampak membangun inovasi DAKU KEREN adalah lebih mudahnya pengelolaan dan pemanfaatan data. Berikut adalah beberapa dampak/ manfaat dari sebuah portal web aplikasi data:

- a. Akses data yang mudah, portal web aplikasi data memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengakses dan mencari data yang mereka butuhkan. Dengan antarmuka yang user-friendly, pengguna dapat menjelajahi data, menjalankan query, dan mengambil informasi secara real-time. Ini menghilangkan ketergantungan pada departemen IT atau analis data untuk mendapatkan akses ke data yang relevan.
- b. Kolaborasi yang meningkat, portal web aplikasi data memfasilitasi kolaborasi antara pengguna dengan memungkinkan mereka berbagi data, laporan, dan visualisasi dengan mudah. Produsen data dari SKPD atau yang memiliki perencanaan yang saling berkaitan dapat bekerja bersama dalam mengakses dan menganalisis data yang sama. Hal ini meningkatkan keterlibatan, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam organisasi.
- c. Visualisasi yang menarik, benar sekali sebuah portal web aplikasi data yang sudah didesain sedemikian rupa sering dilengkapi dengan kemampuan visualisasi data yang kuat. Grafik, diagram, dan dashboard yang interaktif membantu pengguna memahami data dengan lebih baik. Visualisasi yang menarik memudahkan pengguna untuk mengidentifikasi

pola, tren, dan wawasan yang mungkin tersembunyi dalam data mentah. Ini juga membantu dalam menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dimengerti dan mempengaruhi pengambilan keputusan.

- d. Peningkatan pengambilan keputusan: portal web aplikasi data membantu pengguna dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Dengan akses data yang real-time dan visualisasi yang mudah dipahami, pengguna dapat menganalisis data dengan lebih mendalam dan mendapatkan wawasan yang lebih akurat. Keputusan dapat dibuat berdasarkan bukti dan informasi yang terpercaya, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi operasional dan keberhasilan bisnis.
- e. Monitoring kinerja, karena web aplikasi data dapat digunakan untuk memantau kinerja bisnis secara real-time. *Key performance indicators* (KPIs) dan metrik yang relevan dapat ditampilkan dalam bentuk grafik atau dashboard, memungkinkan pengguna untuk melacak pencapaian tujuan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus. Monitoring kinerja secara terus-menerus memungkinkan perusahaan untuk mengambil tindakan yang cepat dan tepat guna.
- f. Penghematan waktu dan biaya, dengan portal web aplikasi data, pengguna dapat mengakses data langsung melalui antarmuka web tanpa perlu melibatkan proses manual atau pengolahan data yang rumit. Hal ini menghemat waktu dan biaya yang diperlukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan membagikan informasi. Selain itu, pengguna juga dapat menghindari kesalahan manusia yang mungkin terjadi dalam proses pengolahan data manual.

Dari Dinas Kominfosan di dalam proses monitoring dan evaluasi telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap 21 orang responden, yang mana hasilnya adalah sebagai berikut

- Dari 21 orang responden, 85% pernah mengakses inovasi DAKU KEREN. Cara memperoleh informasi terkait DAKU KEREN mayoritas adalah dari teman
- 52,4% menyatakan user interface portal DAKU KEREN sangat mudah dioperasikan, dan 47,6% menyatakan mudah dioperasikan

- Terhadap pertanyaan kendala selama mengakses, 90,5% tidak mengalami kendala, namun masih terdapat 9,5% yang mengalami kendala mengakses
- Terkait dengan kemudahan pencarian data, sebanyak 52,4% responden menyatakan sangat mudah 42,6% mudah mencari data, dan 5,1 merasa tidak mampu mencari data
- Sebanyak 71,4% responden menyatakan data yang tersedia lengkap dan sisanya sebanyak 23,5% menyatakan data yang tersedia sangat lengkap.

Kedepannya, mengukur keberhasilan program inovasi DAKU KEREN dapat dapat menggunakan indikator yang relevan lainnya yakni

- a. **Peningkatan Akses dan Penggunaan:** selain melihat peningkatan jumlah pengakses dan pengguna portal web aplikasi DAKU KEREN perlu dibreakdown lagi menjadi mengukur jumlah pengguna aktif, frekuensi penggunaan, dan durasi waktu yang dihabiskan dalam menjelajahi dan mengakses data melalui portal. Jika ada peningkatan yang signifikan dalam hal-hal ini, dapat dianggap sebagai indikator keberhasilan.
- b. **Peningkatan Kualitas Data,** program inovasi seharusnya bisa meningkatkan kualitas data yang digunakan. Dapat diukur tingkat kesalahan data sebelum dan setelah program inovasi diimplementasikan. Jika ada penurunan jumlah kesalahan data, atau peningkatan keakuratan dan kebersihan data, ini menunjukkan keberhasilan program inovasi dalam meningkatkan kualitas data.
- c. **Efisiensi Operasional,** dapat diukur penghematan waktu dalam mengakses dan menganalisis data melalui portal. Jika ada peningkatan dalam efisiensi operasional, seperti pengurangan waktu yang dihabiskan dalam proses manual atau pengolahan data yang rumit, maka ini menunjukkan keberhasilan program inovasi.
- d. **Peningkatan Pengambilan Keputusan.** Sehubungan inovasi DAKU KEREN bertujuan menyajikan data untuk analisis perencanaan pembangunan secara mudah dan cepat, maka keberhasilan program inovasi dapat diukur dari pengambilan keputusan perencanaan yang lebih baik dan lebih cepat khususnya terkait dengan perencanaan pembangunan. Dapat dikumpulkan umpan balik dari para pengguna

portal inovasi DAKU KEREN tentang informasi yang disediakan oleh aplikasi membantu mereka dalam membuat keputusan yang lebih baik. Selain itu, Anda juga dapat melihat peningkatan dalam penggunaan informasi dan wawasan dari data yang disediakan oleh aplikasi.

- e. **Peningkatan Kinerja pemerintahan daerah**, pada akhirnya untuk mengukur mengukur keberhasilan program inovasi DAKU KEREN adalah dengan melihat dampaknya pada kinerja pemerintahan secara keseluruhan yang meningkat. Seperti capaian terhadap target indikator pembangunan yang telah dirancang dan ditetapkan, peningkatan pendapatan, peningkatan kepuasan pelanggan, atau penurunan biaya operasional. Sementara target capaian indikator pembangunan yang ditetapkan adalah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah dan penyelesaian permasalahan pembangunan

4. Sistem Penilaian Instrumen Kinerja (SIPETRUK)

4.1 Deskripsi Inovasi

Inovasi Sistem Penilaian Instrumen Kinerja (SIPETRUK) sebagai tindak lanjut pemberian penghargaan bagi aparatur sipil negara berprestasi adalah inovasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Balangan di bidang tata kelola pemerintahan dan diimplementasikan sejak 29 Maret 2021. Intinya inovasi SI PETRUK adalah sebuah sistem sederhana yang dibangun untuk menilai berprestasi ASN melalui beberapa indikator dan dalam pelaksanannya by sistem yang menjadi bagian dari sistem layanan kepegawaian (Silka) pada BKPPD Balangan.

Inovasi tersebut dilatar belakangi oleh amanat peraturan sebagai berikut

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
 - Dalam pasal 48 ayat 2 dijelaskan bahwa “Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh PPK untuk pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi serta pemberian penghargaan bagi PNS”.
 - Dalam pasal 51 ayat 4 poin f dijelaskan bahwa “PyB sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan laporan dokumen penilaian kinerja

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dijadikan acuan dalam memberikan penghargaan dan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara.

- Dalam pasal 20 ayat(2) dijelaskan bahwa “Dalam hal pegawai menunjukkan kemajuan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pimpinan dapat memberikan: apresiasi dan/atau penugasan baru.
- Dalam pasal 27 dijelaskan bahwa “Tindaklanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d terdiri atas pelaporan kinerja pegawai, keberatan, pemeringkatan kinerja pegawai, penghargaan dan sanksi”.
- Dalam pasal 31 ayat 3 dijelaskan bahwa “Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK dapat memberikan penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

c. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi

Merujuk pada poin dasar hukum yang disampaikan di atas menegaskan bahwa bahwa instansi baik pusat maupun daerah harus memberikan apresiasi terhadap aparatur sipil negara yang menunjukkan integritas, dedikasi dan prestasi dengan kinerja yang baik dengan **memberikan penghargaan** sesuai dengan peraturan yang ditetapkan sebagai salah satu sarana untuk memberikan motivasi untuk terus bekerja dengan baik dalam memberikan pelayanan publik.

Permasalahan yang dihadapi pada awalnya yang melatarbelakangi inovasi SIPETRUK adalah

Masalah makro yakni sebagai berikut

- a. Tantangan bagi aparatur sipil negara di era globalisasi dan digitalisasi baik di instansi pusat dan daerah menuntut adanya ekspektasi tinggi, dalam kinerja untuk mencapai tujuan ASN Berkelas Dunia (World Class

- ASN) di tahun 2024. Untuk mencapai tujuan tersebut aparatur sipil negara harus melek digital dan mengikuti perkembangan zaman.
- b. Permasalahan kompetensi menjadi hal yang patut menjadi PR besar bagi instansi pengelola manajemen kepegawaian. Kompetensi pegawai menjadi faktor utama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut bisa dilihat saat ini adanya sistem perekrutan pegawai saat ini yang lebih mengedepankan masa kerja dan pengabdian bukan lagi kecakapannya.
 - c. Keteladanan seorang aparatur sipil negara juga masih menjadi hal yang patut dipertanyakan dengan masih adanya pegawai yang tersangkut kasus tindak pidana yang tentunya mencoreng profesi ASN.
 - d. Apresiasi/penghargaan terhadap pegawai yang masih minim dilaksanakan yang menyebabkan kinerja dianggap biasa dan kurang berbobot dan sekedar merupakan upaya pemenuhan jam kerja saat ini sehingga motivasi untuk meningkatkan kinerja tidak ada

Masalah mikro yakni sebagai berikut :

- e. Aparatur sipil negara terbiasa dalam melaksanakan pekerjaan lebih kepada menunggu arahan pimpinan sehingga yang bersangkutan kesulitan untuk mengembangkan diri untuk bekerja secara profesional dan kompeten.
- f. Kondisi lingkungan kerja yang kurang kondusif yang menyebabkan motivasi untuk peningkatan kinerjanya tidak stabil.
- g. Pimpinan unit kerja kurang memberikan apresiasi atas capaian kinerja terbaik bawahannya baik secara material ataupun non material.
- h. Masih belum adanya upaya dari pemerintah daerah untuk memberikan penghargaan kepada aparatur sipil negara atas kinerja, dedikasi dan idenya dalam mempermudah pelaksanaan pekerjaan dan sekaligus memberikan dampak dan manfaat yang besar bagi masyarakat (publik).

Sehingga ditawarkan metode & strategi pemecahan masalah yakni Upaya yang dilakukan sebelum adanya inovasi adalah

- melaksanakan diskusi dengan pejabat yang bertanggungjawab mengelola manajemen kepegawaian tentang upaya memberikan apresiasi/ penghargaan kepada pegawa yang telah memberikan kontribusi terbaiknya dalam pencapaian kinerja organisasi;

- menyusun instrumen kinerja yang bisa dijadikan acuan dalam rangka penilaian awal;
- membuat rancangan aplikasi sederhana yang akan digunakan sebagai sarana dalam melaksanakan seleksi bagi pegawai yang berprestasi yang merupakan usulan dari masing-masing unit kerja yang didalamnya terdiri dari komponen disiplin, kinerja dan inovasi yang dilakukan dalam proses pelaksanaan pekerjaan;
- dan melakukan ujicoba aplikasi SI PETRUK sesuai dengan rancangan yang ditetapkan.

Upaya yang dilakukan sesudah adanya inovasi adalah

- Melaksanakan Sosialisasi SI PETRUK kepada perwakilan pejabat OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
- Implementasi Aplikasi Sistem Penilaian Instrumen Kinerja (SI PETRUK) menjadi sistem yang digunakan untuk melaksanakan seleksi terhadap pegawai berprestasi pada setiap kinerja yang dipilih oleh Kepala OPD tentunya dengan pertimbangan terkait dengan kelayakan pegawai yang bersangkutan. Calon pegawai yang diusulkan akan dinilai oleh admin OPD yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- Melaksanakan ceremonial pemberian penghargaan yang disampaikan oleh Kepala Daerah.

Adapun manfaat atau dampak hilir yang diperoleh melalui inovasi SIPETRUK adalah

- a. SI PETRUK merupakan sistem sederhana yang dibangun sebagai upaya untuk menilai kinerja pegawai yang selanjutnya ditetapkan sebagai aparatur sipil negara berprestasi/ berkinerja terbaik yang belum pernah ada sebelumnya.
- b. Menjadi salah satu alternatif untuk memberikan penilaian kinerja pegawai di seluruh SKPD pada Pemerintah Kabupaten Balangan, dengan mencanangkan dan menekankan perubahan pola pikir dan pola bersikap (*mindset & culture set*) ASN menjadi lebih bersikap melayani dan berpikir inovatif.

4.2 Data Perubahan

Tabel 6. Perubahan Inovasi SI PETRUK

Indikator	Deskripsi Perubahan
Jumlah ASN berprestasi/ berprestasi terbaik	Pada tahun 2021 telah diberikan penghargaan ASN berprestasi dan berkinerja baik kepada 22 orang ASN dari SKPD di Kabupaten Balangan. Sedangkan di tahun 2022 tidak terlaksana karena terdapat kegiatan lain yang lebih prioritas.
Jumlah ASN yang dinilai dan diukur tingkat prestasinya	Di Kabupaten Balangan sesuai dengan data SILKA terdapat 3.106 yang terdiri dari ASN, CPNS dan PPPK, dari jumlah tersebut sebanyak 2.911 adalah PNS dan CPNS
Kemudahan dalam penilaian prestasi ASN Balangan	Bahwa sebelumnya meskipun menggunakan indikator yang hampir sama yakni nilai ekin, tingkat kehadiran/ disiplin, inovasi/ lainnya, penilaian perilaku (aplikasi e-perilaku) dan tema work saat ini menjadi lebih mudah karena sudah by sistem dan tidak secara manual dengan pengumpulan berkas sehingga tingkat keakuratan tinggi dan minim kesalahan, sedangkan kedepannya akan ditambahkan indikator hasil wawancara dengan ahli untuk semakin menghasilkan penilaian ASN/ berkinerja yang lebih obyektif dari semua aspek.
Perubahan pola pikir dan pola sikap ASN	Ini adalah dampak kegiatan yang diharapkan bisa dihasilkan dari pemberian apresiasi dalam bentuk penghargaan kepada ASN berprestasi karena dapat meningkatkan motivasi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan loyalitas terhadap institusi, memperbaiki kinerja dan membangun citra baik institusi, inilah yang ingin dibangun dari inovasi SIPETRUK/
Kecepatan memperoleh inovasi	Adapun sesuai dengan SOP SI PETRUK dapat diketahui bahwa dari awal pengusulan ASN berprestasi, penetapan dan pemberian nilai, melaksanakan input data ASN, menandatangani berkas cetak formulir, memverifikasi usulan ASN dan mencetak sertifikat membutuhkan waktu 3 jam 20 menit. Hal ini dinilai lebih efektif dari efisien dari segi waktu, ditambah lagi by sistem yakni Silka.

Sumber: hasil analisis, 2022

Pemberian apresiasi penghargaan bagi ASN berprestasi memiliki dampak yang positif dan penting, yakni meningkatkan motivasi, produktivitas, loyalitas, dan kinerja organisasi secara keseluruhan, membangun budaya kerja yang positif dan memperkuat hubungan antara ASN dan organisasi.

Dampak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Motivasi dan Pengakuan, pemberian apresiasi penghargaan kepada ASN yang berprestasi memberikan pengakuan dan penghargaan atas kerja keras, dedikasi, dan kontribusi mereka. Hal ini dapat meningkatkan motivasi ASN untuk terus bekerja dengan baik dan berprestasi lebih baik lagi di masa depan. Penghargaan juga dapat memberikan rasa bangga

- dan kepuasan pribadi kepada ASN, yang dapat mendorong mereka untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaan mereka.
- b. Peningkatan produktivitas, dengan merasa dihargai dan diakui atas kinerja mereka, ASN cenderung merasa lebih termotivasi dan terinspirasi untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dalam tugas-tugas mereka. Mereka dapat meningkatkan efisiensi, kualitas pekerjaan, dan inovasi dalam melaksanakan tugas-tugas mereka, yang pada akhirnya berdampak positif pada pencapaian tujuan organisasi.
 - c. Meningkatkan loyalitas dan retensi, pemberian apresiasi penghargaan dapat membantu dalam membangun ikatan dan loyalitas ASN terhadap organisasi. ASN yang merasa dihargai dan diakui cenderung lebih terikat secara emosional dengan organisasi mereka. Ini dapat meningkatkan tingkat retensi ASN yang berprestasi dan mengurangi risiko kehilangan bakat yang berharga dalam organisasi. ASN yang menerima penghargaan juga dapat menjadi duta organisasi dan membantu menjaga citra positif organisasi di masyarakat.
 - d. Mendorong perbaikan kinerja, penghargaan yang diberikan kepada ASN berprestasi dapat menjadi contoh yang menginspirasi ASN lain untuk meningkatkan kinerja mereka. ASN yang melihat rekan mereka mendapatkan penghargaan cenderung termotivasi untuk meningkatkan kinerja mereka sendiri dan berupaya mencapai tingkat yang sama atau bahkan lebih tinggi. Hal ini menciptakan budaya kerja yang kompetitif dan berorientasi pada prestasi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja keseluruhan organisasi.
 - e. Peningkatan citra organisasi, pemberian apresiasi penghargaan kepada ASN berprestasi dapat membantu meningkatkan citra dan reputasi organisasi. Organisasi yang memiliki program penghargaan yang baik dan konsisten cenderung dilihat sebagai organisasi yang peduli terhadap karyawan mereka dan menghargai prestasi. Ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap organisasi, baik sebagai tempat kerja yang diinginkan maupun sebagai lembaga yang kompeten dan sukses.

4.3 Analisis Dampak

Keunggulan dan kebaruan dari inovasi SIPETRUK apabila dibandingkan dengan inovasi sejenis yakni

1. SI PETRUK merupakan sistem sederhana yang dibangun sebagai upaya untuk menilai kinerja pegawai yang selanjutnya ditetapkan sebagai aparatur sipil negara berprestasi/berkinerja terbaik yang belum pernah ada sebelumnya.
2. Keterlibatan tim internal yang melakukan verifikasi kelayakan pegawai yang diusulkan dan tim eksternal yang akan memberikan penilaian secara objektif berdasarkan hasil presentasi dan wawancara.
3. Adanya muatan instrumen kinerja antara lain disiplin berdasarkan kehadiran, capaian kinerja melalui SKP Tahunan dan Ide/Inovasi yang telah dilaksanakan dalam mempermudah pekerjaan.
4. Pencapaian yang diperoleh dengan adanya SI PETRUK yaitu peningkatan kinerja ASN dari standar atau instrumen yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah, dan ASN terus termotivasi dengan adanya pemberian penghargaan sebagai ASN berkinerja terbaik

Tahapan dalam Inovasi Sistem Penilaian Instrumen Kinerja (SI PETRUK) yaitu:

1. Ujicoba SI PETRUK di lingkup BKPPD/BKPSDM Kabupaten Balangan dilaksanakan pada tanggal 29-30 Maret 2021.
2. Sosialisasi SI PETRUK dengan menghadirkan Sekretaris selaku perwakilan Pejabat Administrator dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dilaksanakan pada tanggal 15 April 2021 di Aula Benteng Tundakan.
3. Implementasi SI PETRUK dengan melibatkan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai admin melakukan penginputan data pegawai yang telah dinilai layak oleh Tim Internal SKPD pada tanggal 19 April 2021.
4. Hasil Cetak Hasil Penilaian yang dilakukan oleh Kepala SKPD Bersama Tim Internal kemudian dicetak dan disampaikan kepada BKPSDM Balangan
5. Verifikasi oleh Tim Internal BKPSDM
6. Penetapan Aparatur Sipil Negara Berprestasi/Berkinerja Terbaik melalui SK Bupati Balangan sebanyak 22 orang di lingkup SKPD Kabupaten Balanga Tahun 2021.

7. Ceremonial Pemberian Penghargaan yang disampaikan oleh Kepala Daerah.

Secara teoritis, dalam mengukur ASN berprestasi, dapat digunakan beberapa metode dan indikator yakni berikut:

1. Evaluasi Kinerja:

Melalui evaluasi kinerja, dapat diukur kualitas dan hasil kinerja ASN. Metode ini melibatkan penilaian terhadap pencapaian target kerja, kompetensi, inisiatif, kolaborasi, kepemimpinan, dan kualitas pekerjaan secara keseluruhan. Evaluasi kinerja dapat dilakukan melalui penilaian atasan langsung, *peer review*, atau melalui metode 360 derajat yang melibatkan berbagai pihak yang terlibat dengan ASN tersebut.

2. Pencapaian target

Salah satu indikator yang penting adalah pencapaian target kerja yang ditetapkan untuk ASN yang dapat berupa target kuantitatif, seperti volume pekerjaan yang diselesaikan, atau target kualitatif, seperti kepuasan pelanggan atau peningkatan efisiensi proses kerja. Pengukuran pencapaian target dapat dilakukan secara periodik dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

3. Kualitas Pelayanan

Jika ASN terlibat dalam pelayanan publik atau interaksi penerima layanan, kualitas pelayanan dapat menjadi indikator penting. Hal ini dapat diukur melalui survei kepuasan pengguna, umpan balik dari pengguna, atau melalui evaluasi kualitas pelayanan secara internal. Pertimbangkan aspek seperti responsivitas, kecepatan penyelesaian masalah, keramahan, dan kepuasan penerima layanan.

4. Kontribusi Inovatif

Jika ASN berkontribusi dalam inovasi atau perbaikan proses kerja, indikatornya dapat berfokus pada ide-ide inovatif yang dihasilkan, pelaksanaan perbaikan, atau dampak yang dihasilkan dari inovasi tersebut. Misalnya, jumlah ide yang diimplementasikan, efisiensi yang ditingkatkan, penghematan biaya, atau peningkatan kualitas hasil kerja.

5. Tingkat Kehadiran dan Kedisiplinan

Tingkat kehadiran yang baik dan kedisiplinan yang tinggi adalah indikator penting dalam mengukur kinerja ASN. Hal ini mencerminkan tanggung jawab, komitmen, dan dedikasi ASN terhadap pekerjaan mereka. Dapat digunakan ukuran jumlah hari kerja yang tidak hadir, keterlambatan, atau melalui evaluasi kedisiplinan secara keseluruhan.

6. Pengembangan Kompetensi

Indikator lain adalah tingkat pengembangan kompetensi yang dapat diukur melalui partisipasi dalam pelatihan atau program pengembangan, sertifikasi yang diperoleh, peningkatan kompetensi yang terbukti dalam tugas-tugas kerja, atau melalui peningkatan dalam tanggung jawab yang dapat dijalankan.

7. Penghargaan dan Pengakuan

Penghargaan dan pengakuan yang diterima oleh ASN juga dapat menjadi indikator yang relevan. Jika ASN menerima penghargaan atau pengakuan baik dari internal organisasi maupun dari eksternal, hal ini dapat mencerminkan

Pemberian apresiasi penghargaan ASN yang berprestasi memiliki dampak yang positif dan penting. Berikut ini adalah beberapa dampaknya:

- a. Motivasi dan pengakuan, pemberian apresiasi penghargaan kepada ASN yang berprestasi memberikan pengakuan dan penghargaan atas kerja keras, dedikasi, dan kontribusi mereka. Hal tersebut dapat meningkatkan motivasi ASN untuk terus bekerja dengan baik dan berprestasi lebih baik lagi di masa depan. Penghargaan juga dapat memberikan rasa bangga dan kepuasan pribadi kepada ASN, yang dapat mendorong mereka untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaan mereka.
- b. Peningkatan produktivitas, dengan merasa dihargai dan diakui atas kinerja mereka, ASN cenderung merasa lebih termotivasi dan terinspirasi untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dalam tugas-tugas mereka. Mereka dapat meningkatkan efisiensi, kualitas pekerjaan, dan inovasi dalam melaksanakan tugas-tugas mereka, yang pada akhirnya berdampak positif pada pencapaian tujuan organisasi.
- c. Meningkatkan loyalitas dan retensi, ASN yang merasa dihargai dan diakui cenderung lebih terikat secara emosional dengan organisasi mereka. Ini dapat meningkatkan tingkat retensi ASN yang berprestasi dan mengurangi

risiko kehilangan bakat yang berharga dalam organisasi. ASN yang menerima penghargaan juga dapat menjadi duta yang baik bagi organisasi dan membantu dalam menjaga citra positif organisasi di masyarakat.

- d. Mendorong perbaikan kinerja, penghargaan yang diberikan kepada ASN berprestasi dapat menjadi contoh yang menginspirasi ASN lain untuk meningkatkan kinerja mereka. ASN yang melihat rekan mereka mendapatkan penghargaan cenderung termotivasi untuk meningkatkan kinerja mereka sendiri dan berupaya mencapai tingkat yang sama atau bahkan lebih tinggi. Hal ini menciptakan budaya kerja yang kompetitif dan berorientasi pada prestasi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja keseluruhan organisasi.
- e. Peningkatan citra organisasi, organisasi yang memiliki program penghargaan yang baik dan konsisten cenderung dilihat sebagai organisasi yang peduli terhadap karyawan mereka dan menghargai prestasi. Ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap organisasi, baik sebagai tempat kerja yang diinginkan maupun sebagai lembaga yang kompeten dan sukses.

Secara keseluruhan, pemberian apresiasi penghargaan kepada ASN berprestasi memiliki dampak yang positif dalam meningkatkan motivasi, produktivitas, loyalitas, dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Ini juga membantu membangun budaya kerja yang positif dan memperkuat hubungan antara ASN dan organisasi.

Setelah memperoleh penghargaan atas prestasi, ASN dapat mengalami perubahan pola pikir dan sikap yang positif. Perubahan pola pikir dan sikap tersebut berdampak positif secara individu maupun secara kolektif dalam meningkatkan kinerja dan prestasi keseluruhan organisasi. Berikut beberapa penjelasan terkait dengan dampak positifnya

- a. Meningkatkan motivasi, karena merasa diakui dan dihargai atas kerja keras dan kontribusi mereka, yang mendorong mereka untuk terus berprestasi dan memberikan yang terbaik dalam pekerjaan mereka.
- b. Meningkatnya kepercayaan diri individu, karena terdapat perasaan yakin dengan kemampuan dan kualitas kerja, sehingga dapat menghadapi

tantangan dengan lebih baik dan mengambil inisiatif untuk mencapai hasil yang lebih baik.

- c. Memiliki dorongan untuk lebih berkembang lagi, pemberian penghargaan membangun keinginan terus belajar dan mengembangkan diri. Adanya kesadaran bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil dari upaya, sehingga lebih termotivasi untuk mengikuti pelatihan, mengembangkan kompetensi, dan mencari peluang untuk meningkatkan keterampilan.
- d. Perubahan sikap terhadap pekerjaan, yakni menjadi lebih positif terhadap pekerjaan. Timbul keinginan untuk lebih berkomitmen dan lebih termotivasi untuk menjalankan tugas-tugas dengan penuh dedikasi dan profesionalisme.
- e. Peningkatan kualitas kerja, yakni karena lebih berfokus pada kualitas, inovasi, dan pencapaian target yang lebih tinggi untuk terus mempertahankan atau meningkatkan tingkat prestasi yang telah dicapai.
- f. Memberikan pengaruh positif terhadap rekan kerja, karena menjadi contoh yang menginspirasi bagi rekan kerja lainnya. Prestasi yang dicapai dapat memotivasi dan mempengaruhi rekan kerja untuk meningkatkan kinerja, sehingga menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada prestasi dan kualitas.
- g. Dapat meningkatkan citra diri dan organisasi, dimana pemberian penghargaan dapat menciptakan kebanggaan dan rasa kepemilikan terhadap pekerjaan dan organisasi, serta dapat meningkatkan reputasi organisasi di mata masyarakat.

5. Sistem Aplikasi Sporadik dalam Jaringan (SIAP SPORING)

5.1 Deskripsi Inovasi

Dalam rangka melaksanakan amanat pengamanan aset daerah berupa tanah sebagaimana diatur dalam Permendagri 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta amanat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK mengenai sertifikasi aset tanah Pemerintah Daerah, Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup berupaya melaksanakan proses sertifikasi aset tanah Pemerintah Daerah. Salah satu tahapan proses sertifikasi

tersebut adalah pembuatan Surat Pernyataan Pengusahaan Fisik (SPPF), yang umumnya dalam masyarakat disebut Sporadik.

Di dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2001 tentang Hal Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pendaftaran tanah diarahkan secara elektronik. Upaya percepatan pendaftaran tanah adalah melalui sistematik yang wajib diikuti oleh pemilik bidang tanah (pemutihan) atau mendaftarkan tanahnya secara sporadik. Sporadi diterapkan untuk desa/kelurahan yang belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematik.

Berdasarkan pelaksanaan pembuatan Sporadik yang telah dilakukan sebelumnya, ditemukan fakta bahwa proses pembuatan Sporadik di kantor desa maupun kelurahan dilakukan secara manual, dimana Kepala Desa atau staf kelurahan membuat Sporadik dengan cara melakukan edit manual pada file dokumen Sporadik yang ada di perangkat mereka. Di beberapa desa bahkan didapatkan informasi bahwa Kepala Desa tidak memiliki dokumentasi yang baik mengenai Sporadik yang telah diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Permasalahan yang dialami dalam pembuatan sporadik di level desa dan kelurahan adalah :

- Pembuatan sporadik masih manual oleh masing-masing kepala desa/ aparat kelurahan
- Belum ada format sporadik resmi (format sporadik masih berbeda-beda)
- Belum ada rekap data kepemilikan tanah di Kabupaten Balangan

Berangkat dari hasil pengamatan tersebut diatas, maka muncul ide untuk membuat sebuah sistem informasi aplikasi yang dapat membantu para Kepala Desa maupun Kelurahan dalam membuat Sporadik milik masyarakat dan pemerintah yang telah dterstandarisasi serta dapat didokumentasikan dengan

baik dalam sebuah database Sporadik Kabupaten. Penggunaan sistem informasi ini juga diharapkan dapat memberikan hasil pengukuran luas tanah yang menjadi obyek Sporadik secara lebih presisi, dengan memanfaatkan data geospasial. Penggunaan sistem informasi ini juga bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dalam hal pendataan jumlah kepemilikan tanah di Kabupaten Balangan, dimana data ini rutin ditanyatakan sebagai bagian dari penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi tersebut diberi nama Sistem Aplikasi Sporadik Dalam Jaringan (SIAP SPORING) yang diprakarsai oleh Bidang Pertanahan Dinas Lingkungan Hidup dan diimplementasikan sejak 16 Mei 2023. Inovasi SIAP SPORING bertujuan memberikan kemudahan kepada kepala desa dan kelurahan dalam pembuatan sporadik dan memudahkan PEMKAB Balangan dalam mendata kepemilikan serta pemetaan tanah.

Adapun manfaat atau dampak hilir yang dirasakan dari inovasi SIAP SPORING adalah

- Keseragaman Format Sporadik yang ada di Kabupaten Balangan
- Memudahkan kepala desa dalam pembuatan sporadik
- Tersedianya rekap data kepemilikan tanah di Kabupaten Balangan
- Pembuatan sporadik lebih efisien karena menggunakan tandatangan digital

Sesuai dengan PP Nomor 24/1997 pasal 14-22 kegiatan pendaftaran tanah terdiri dari

1. Pembuatan peta dasar pendaftaran
2. Penetapan batas bidang-bidang tanah
3. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran
4. Pembuatan daftar tanah
5. Pembuatan surat ukur → dasar penerbitan sertifikat tanah

Sedangkan persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran tanah secara sporadik adalah

1. Surat permohonan dari pemilik tanah yang melakukan pensertifikatan tanah miliknya
2. Surat kuasa (apabila pengurusannya dikuasakan kepada orang lain)
3. Identitas dari pemilik tanah (pemohon) yang dilegalisir oleh pejabat umum yang berwenang (biasanya notaris) dan atau kuasanya

- a. Untuk perorangan : fotocopy KTP dan KK sedangkan untuk
 - b. Badan hukum (dalam hal ini PT/ yayasan/ koperasi) adalah anggaran dasar berikut seluruh perubahan dan pengesahan dari menteri yang berwenang
4. Bukti hak atas tanah yang dimohonkan, yaitu berupa
 - a. Surat tanda buti hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan swapraja yang bersangkutan
 - b. Sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan PMA 9/1959
 - c. Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya
 - d. Patok pajak bumi/ landrent, girik, pipil, ketitir dan verponding indonesia sebelum berlakunya PP 10/1961
 - e. Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda tangan kesaksian oleh Kepala Adat/ Kepala daerah/ kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya PP 10/1961 dengan disertai atas hak yang dialihkan
 - f. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai atas hak yang dialihkan, atau
 - g. Akta ikrar wakaf/ akta pengganti ikrar wakaf/ surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan PP 28/1977 dengan disertai atas hak yang diwakafkan atau risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang berwenang yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai atas hak yang dialihkan atau
 - h. Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh pemerintah daerah
 - i. Risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai atas hak yang dialihkan
 - j. Surat keterangan riwaya tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai atas hak yang dialihkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

- k. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam pasal II, VI, dan pasal VII ketentuan-ketentuan konversi UUPA,
- l. Surat kepemilikan bukti lainnya yang terbit dan berlaku sebelum diberlakukannya UUPA (dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini biasanya lurah setempat)
- m. Bukti lainnya, apabila tidak ada surat bukti kepemilikan yaitu berupa surat pernyataan penguasaan fisik lebih dari 20 tahun secara terus menerus dan surat keterangan kepala desa/ lurah disaksikan oleh 2 orang tetua adat/ penduduk setempat
- 5. Surat pernyataan telah memasang tanda batas
- 6. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan
- 7. Fotocopy SK ijin lokasi dan surat keterangan lokasi (apabila pemohon adalah Badan Hukum)

Cara kerja inovasi SIAP SPORING sesuai dengan juknis yang disusun oleh Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan LH adalah Terdapat alamat <https://linktr.ee/siapsporing> yang dibagikan dan disosialisasikan ke seluruh desa dan kelurahan. Sesuai dengan juknis inovasi SIAP SPORING disebutkan bahwa layanan SPPF/ sporadik yang disediakan untuk SPPF perorangan dan SPPF pemerintah daerah. Melalui link tersebut diarahkan untuk mengisi data mengenai bidang tanah yang dimiliki, batas utara, timur, selatan, barat, dan seterusnya data diisi; kemudian muncul layer pemberitahuan bahwa sudah disubmit/ kirim, admin kemudian membuka database SIAP SPORING, pilih ekstensi *autocrat*, klik tombol *run job* pada pilihan sporadik yang akan dicetak, buka folder SIAP SPORING dan klik ganda dimana file SPPF hasil *generate autocrat*, sporadik siap dicetak/ diunduh.

Tahapan pembuatan sporadik dengan SIAP SPORING adalah sebagai berikut :

1. Pemohon menyampaikan permohonan sporadik melalui aplikasi
2. Memeriksa kelengkapan berkas data dukung permohonan
3. Melakukan pemeriksanaan lapangan serta menentukan titik koordinat batas tanah
4. Melakukan validasi lokasi tanah terhadap basis data tanah
5. Melakukan entry data sporadik
6. Menghubungi pemohon untuk hadir dengan membawa saksi
7. Melakukan penandatanganan sporadik

8. Melakukan validasi sporadik menggunakan tandatangan digital
9. Menyerahkan sporadik kepada pemohon
10. Menerima sporadik dari Kepala Desa

5.2 Data Perubahan

Tabel 7. Data Perubahan inovasi SIAP SPORING

Indikator	Deskripsi Perubahan
Pertumbuhan/ pertambahan jumlah sertifikasi sporadik pasca inovasi SIAP SPORING	Penerima manfaat dari inovasi SIAP SPORING diasumsikan sebagai jumlah pengakses terhadap form SPPF Perorangan sebanyak 164 orang dan SPPF pemerintah daerah sebanyak 72 orang. Namun secara keseluruhan keberadaan inovasi SIAP SPORING menumbuhkan/ menambah jumlah sertifikat sporadi sebanyak Buah atau tumbuh sebesar%
Pengumpulan data informasi pendaftaran pendaftaran tanah/ SPPF/Sporadik	Pendaftaran tanah sporadik secara manual melibatkan pengumpulan informasi secara fisik, seperti pengisian formulir secara manual atau pengambilan data langsung dari dokumen fisik seperti akta atau surat tanah. Sementara itu melalui inovasi SIAP SPORING telah dilaksanakan secara elektronik yakni pada pengumpulan informasi melalui pengisian formulir elektronik atau mengimpor data dari sumber elektronik seperti database atau sistem informasi terkait
Pengolahan data dalam pendaftaran tanah/ sporadik aplikasi dalam jaringan	Sebelumnya pada pendaftaran manual, data yang dikumpulkan harus ditranskripsikan atau dimasukkan secara manual ke dalam dokumen atau sistem yang sesuai. Proses ini dapat memakan waktu dan meningkatkan risiko kesalahan manusia. Melalui inovasi SIAP SPORING dalam pendaftaran elektronik, data yang dikumpulkan dapat diolah secara otomatis oleh sistem yang sesuai dalam hal ini (spreadsheet). Data dapat diverifikasi, validasi, dan disimpan secara elektronik, mengurangi risiko kesalahan manusia dan meningkatkan akurasi data
Penyimpanan Data	Pada pendaftaran tanah manual memerlukan penyimpanan fisik dokumen seperti formulir, surat, atau berkas tanah. Dokumen ini harus disimpan secara fisik dalam ruang penyimpanan yang sesuai. Sementara melalui inovasi SIAP SPORING pendaftaran elektronik memungkinkan penyimpanan data dalam bentuk digital. Informasi dapat disimpan di server atau dalam sistem penyimpanan elektronik lainnya, menghilangkan kebutuhan untuk menyimpan dokumen fisik
Aksesibilitas/ keterjangkauan oleh penerima/ pengguna layanan	Aksesibilitas terhadap data pendaftaran manual dapat terbatas karena harus mencari, mengumpulkan, atau mendapatkan akses fisik ke dokumen yang disimpan membutukan waktu dan tenaga. Sedangkan secara elektronik melalui SIAP SPORING memungkinkan aksesibilitas yang lebih mudah dan cepat melalui sistem online. Data dapat diakses dari mana saja dengan koneksi internet dan perangkat yang sesuai.
Dampak terhadap efisiensi pelayanan pendaftaran tanah	Pada awalnya sporadik manual cenderung memakan waktu lebih lama dan lebih rentan terhadap kesalahan manusia dalam pengolahan dan penyimpanan data. Sedangkan SIAP SPORING meningkatkan efisiensi

Indikator	Deskripsi Perubahan
	proses dengan pengolahan otomatis, validasi data, dan penyimpanan elektronik yang lebih efisien
Waktu yang dibutuhkan untuk pengajuan/ memperoleh inovasi	Sesuai dengan SOP yang disusun waktu yang dibutuhkan dari pemohon menyampaikan permohonan sporadik melalui aplikasi; memeriksa kelengkapan berkas data dukung permohonan; sampai dengan menerima sporadik dari kepala desa membutuhkan waktu 4 jam.
Kondisi data kepemilikan tanah yang dapat diakses Pemerintah Daerah untuk keperluan LPPD	Awalnya pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam menyediakan data kepemilikan tanah yang realtime dan aktual. Melalui inovasi SIAP SPORING pendataan kepemilikan tanah akan otomatis tersedia dari rekap permohonan dan penerbitan surat pendaftaran tanah melalui sporadik

Sumber : Hasil Analisis, 2022

5.3 Analisis Dampak

Proses sertifikasi tanah sporadik di desa dan kelurahan dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan peraturan hukum yang berlaku di suatu negara atau wilayah tertentu. Namun, secara umum, berikut adalah langkah-langkah yang mungkin terlibat dalam proses sertifikasi tanah sporadik:

1. Persiapan dokumen, pemilik tanah harus mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan, seperti bukti kepemilikan, peta, surat-surat dokumen pendukung, dan informasi lainnya yang menunjukkan batas-batas tanah yang akan disertifikasi.
2. Pemeriksaan lapangan, badan pertanahan atau instansi terkait, akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memverifikasi batas-batas tanah yang dimaksud. Mereka mungkin menggunakan peta dan dokumen lainnya sebagai acuan.
3. Pemrosesan administrasi, setelah verifikasi lapangan selesai, pemilik tanah harus mengajukan permohonan sertifikasi ke badan pertanahan atau instansi terkait. Permohonan ini biasanya melibatkan pengisian formulir aplikasi dan pembayaran biaya yang relevan.
4. Peninjauan permohonan, Badan pertanahan atau instansi terkait akan meninjau permohonan sertifikasi tersebut. Mereka mungkin memeriksa kelengkapan dokumen, melakukan investigasi tambahan jika diperlukan, dan memastikan bahwa tanah tersebut memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

5. Pengumuman dan waktu tunggu, jika permohonan sertifikasi disetujui, pengumuman akan dibuat untuk memberi tahu masyarakat sekitar dan memberi kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk memberikan masukan atau keberatan terhadap sertifikasi tersebut. Biasanya ada jangka waktu tertentu yang diberikan untuk pemberitahuan dan tanggapan.
6. Pendaftaran dan penerbitan sertifikat, setelah melewati periode pengumuman dan waktu tunggu, jika tidak ada masukan yang signifikan atau keberatan yang diajukan, sertifikat kepemilikan tanah akan diterbitkan. Pemilik tanah akan diminta untuk mendaftarkan sertifikat ini di kantor pertanahan atau badan terkait untuk memastikan pengakuan hukum atas kepemilikan tanah.

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Pemanfaatan Informasi Kepemilikan Tanah serta Sistem Informasi Kepemilikan Tanah Elektronik. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam pembuatan SPPF sesuai dengan PP tersebut:

1. Persiapan Dokumen:
 - Pastikan Anda memiliki dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti bukti kepemilikan tanah (sertifikat, akta, surat ukur), identitas pemilik, dan dokumen pendukung lainnya.
2. Identifikasi Data:
 - Tentukan data yang akan disertakan dalam SPPF, seperti data penguasaan fisik, batas-batas tanah, dan informasi pemilik.
3. Akses Sistem Informasi Kepemilikan Tanah Elektronik (SIKTE):
 - SIKTE adalah sistem yang diperkenalkan dalam PP Nomor 18 Tahun 2021 untuk penerbitan dan pemanfaatan informasi kepemilikan tanah. Akses SIKTE melalui portal yang ditunjuk oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
4. Pengisian Data:
 - Masuk ke sistem SIKTE dan ikuti petunjuk yang diberikan untuk mengisi data yang diminta. Pastikan untuk memberikan informasi yang akurat dan sesuai dengan dokumen yang dimiliki.
5. Penguasaan Fisik:

- SPPF harus mencakup informasi tentang penguasaan fisik tanah. Berikan informasi yang jelas tentang penggunaan, pengelolaan, dan keadaan fisik tanah tersebut.

6. Verifikasi dan Validasi:

- Setelah pengisian data selesai, sistem akan melakukan verifikasi dan validasi data yang Anda berikan. Pastikan data yang dimasukkan sesuai dengan dokumen yang Anda miliki.

7. Penandatanganan:

- Jika data telah diverifikasi dan valid, Anda dapat menandatangani SPPF menggunakan tanda tangan elektronik yang diakui oleh sistem.

8. Penyimpanan dan Penggunaan SPPF:

- Setelah SPPF diterbitkan, Anda dapat menyimpan salinan elektroniknya dan menggunakannya sesuai kebutuhan, misalnya untuk keperluan perizinan atau kegiatan transaksi tanah.

Penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) atau pendaftaran tanah sporadik secara elektronik dapat memberikan sejumlah efisiensi diantaranya adalah

- a. Pengurangan biaya dan penghematan waktu, mengurangi biaya cetak, pengiriman surat fisik, serta penggunaan kertas dan tinta. Hal ini juga menghemat waktu yang biasanya diperlukan untuk proses manual seperti pengisian formulir secara fisik dan pengiriman dokumen.
- b. Akses mudah dan cepat, dimana pemilik tanah atau pihak yang berkepentingan dapat mengakses informasi dengan mudah melalui platform online yang tersedia. Mereka dapat mengakses data kapan saja dan di mana saja menggunakan perangkat dengan koneksi internet, tanpa harus pergi ke kantor atau mengirim dokumen fisik.
- c. Verifikasi otomatis, yakni terhadap data yang dimasukkan dalam SPPF atau pendaftaran tanah sporadik. Ini membantu memastikan kelengkapan dan keakuratan data yang diberikan oleh pemilik tanah atau pihak terkait
- d. Penyimpanan elektronik dan pencarian data yang mudah, Informasi dapat disimpan dalam bentuk digital dan dicatat dalam database atau sistem yang terorganisir dengan baik. Pencarian data dapat dilakukan dengan cepat berdasarkan kriteria tertentu, seperti nama pemilik tanah atau nomor sertifikat.

- e. Kolaborasi dan koordinasi yang lebih baik, terjadi efisiensi dalam kolaborasi dan koordinasi karena dapat saling berbagi data secara real-time, mengurangi kebutuhan untuk pertemuan fisik atau komunikasi melalui surat resmi.
- f. Keamanan dan perlindungan data, karena sistem elektronik dapat memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi terhadap data SPPF atau pendaftaran tanah sporadik. Informasi dapat dilindungi dengan menggunakan enkripsi dan mekanisme keamanan lainnya, mengurangi risiko kebocoran atau manipulasi data.
- g. Monitoring dan pelaporan yang lebih baik, dimana sistem elektronik memungkinkan pemantauan dan pelaporan yang lebih baik terkait dengan proses penerbitan SPPF atau pendaftaran tanah sporadik. Data dapat diolah secara real-time, dan laporan dapat dihasilkan dengan cepat untuk kepentingan pemantauan, evaluasi, atau audit.

Kedepannya untuk mengetahui keberhasilan program pendaftaran tanah sporadik, dapat menggunakan indikator evaluasi sebagai berikut

1. Analisis data pendaftaran, yakni perlunya melihat data pendaftaran tanah sporadik yang telah dikumpulkan. Memeriksa jumlah permohonan yang diterima dan jumlah sertifikat yang berhasil diterbitkan. Perbandingkan angka-angka ini dengan target atau tujuan yang ditetapkan untuk program tersebut.
2. Tingkat penerimaan, perlu mengevaluasi tingkat penerimaan program dengan melihat partisipasi masyarakat dalam mendaftarkan tanah sporadik. Apakah jumlah pemilik tanah yang mendaftar meningkat seiring berjalannya program? Tinjau apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, seperti kesadaran akan manfaat pendaftaran tanah, aksesibilitas proses pendaftaran, atau insentif yang diberikan.
3. Kualitas data, perlunya memeriksa kualitas data yang dihasilkan melalui program pendaftaran. Mengevaluasi data-data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, akurat, dan terverifikasi dengan baik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sertifikat tanah yang diterbitkan berdasarkan data yang valid dan dapat dipercaya.
4. Efisiensi dan kecepatan, perlunya melihat efisiensi dan kecepatan proses pendaftaran. Evaluasi waktu yang dibutuhkan dari permohonan pendaftaran

- hingga penerbitan sertifikat tanah. Kelancaran proses, terjadi bottleneck atau hambatan dan perlu diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi atau tidak.
5. Feedback/ umpan balik dari pengguna layanan, umpan balik dapat diperoleh setelah dilakukan survei atau wawancara dengan pemilik tanah yang telah mengalami proses pendaftaran. Tinjau kepuasan mereka terhadap program, kendala yang mereka temui, dan saran untuk perbaikan.
 6. Keberlanjutan program pendaftaran tanah sporadik, yakni mengevaluasi ketersediaan dan keberlanjutan infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan untuk melanjutkan program. Tinjau keberadaan kebijakan atau peraturan yang mendukung kelanjutan program ini dalam jangka panjang.

6. Optimalisasi Pengumpulan Data Statistik Sektoral (OPEDASS)

6.1 Deskripsi Inovasi

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi dan penyelenggaraan statistik sektoral serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Unsur-unsur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri dari Sekretariat, Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika, Bidang Statistik dan Persandian, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan No 83 Tahun 2021 pada pasal 20 ayat 1 menyebutkan statistik sektoral mempunyai tugas yang salah satunya adalah mengumpulkan data. Data-data yang sudah terkumpul tersebut kemudian akan diolah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk pengambilan keputusan dalam mendorong kemajuan Kabupaten Balangan.

Permasalahan hulu yang mendasari perlunya inovasi ini adalah adalah hasil pengamatan selama bekerja di bidang statistik sektoral dan persandian, sistem pengumpulan data masih menggunakan cara manual yaitu menyebarkan

banyak kertas-kertas form kuisioner kepada para responden yang kemudian data-data yang sudah didapat tersebut di input kembali ke dalam program komputer. Sistem pengumpulan data seperti yang dijabarkan di atas dirasa masih kurang optimal dan efisien baik dari segi waktu dan biaya.

Sistem pengumpulan data dengan cara yang di atas perlu waktu yang lama untuk bisa mengubah data menjadi sebuah informasi yang bernilai guna bagi kemajuan Kabupaten Balangan. Hal ini dikarenakan lamanya menginput data hasil survei, selain itu penggunaan kertas juga mengalami peningkatan termasuk biaya cetak form-form kuisioner.

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, metode dan strategi pemecahan masalah yang ditawarkan untuk mengoptimalkan pengumpulan data adalah dengan menggunakan *google form* dan *google sheet* atau aplikasi pembuatan form lainnya. Penggunaan kuisioner lewat *google form* bisa digunakan untuk responden yang bertempat tinggal di daerah yang mudah dijangkau oleh akses internet sedangkan kuisioner yang menggunakan *google sheet* bisa digunakan untuk para responden yang bertempat tinggal di wilayah yang masih sulit dijangkau akses internet.

Dengan menggunakan aplikasi pembuatan form tersebut maka biaya penggunaan kertas dan cetak form bisa dihemat, selain itu waktu juga tidak banyak terbuang untuk input data dari lembaran-lembaran kertas form ke program komputer pengolahan data.

Tujuan dari Optimalisasi Pengumpulan Data Statistik Sektoral (OPEDASS) adalah

1. Dapat memangkas waktu pengolahan data
2. Dapat memangkas penggunaan biaya dalam hal penggunaan kertas dan biaya cetak form kuisioner.

Sehingga data-data yang sudah terkumpul bisa langsung diolah menjadi sebuah informasi tanpa harus menunggu waktu yang lebih lama dan selain itu juga bisa menghemat biaya.

Tahapan inovasi pada OPEDASS (Optimalisasi Pengumpulan Data Statistik Sektoral adalah sebagai berikut :

1. Mengisi *Google Form/ Google Sheet* melalui Link yang telah disebarluaskan kepada para tim survei
2. Validasi data survei yang masuk

3. Rekapitulasi Data survei yang masuk untuk diolah menjadi sebuah informasi

6.2 Data Perubahan

Tabel 8. Data Perubahan inovasi OPEDASS

Indikator	Deskripsi Perubahan
Jumlah data sektoral yang terkumpul melalui inovasi OPEDASS	
Efisiensi waktu	Sebelumnya untuk memperoleh data Bidang Statistik dan Persandian memerlukan waktu yang relatif lama, melalui inovasi OPEDASS ini cukup memakan waktu 2 jam 15 menit dimulai dari tahapan mengumpulkan data dari masyarakat setempat, mengirimkan data lewat google drive, melakukan pengecekan data dan melakukan pengarsipan data.
Proses Pengumpulan Data:	Sebelum inovasi OPEDASS pengumpulan data survei dilakukan secara manual yakni dengan penyampaian kuesioner secara fisik kepada responden. Responden diharapkan mengisi dan mengembalikan kuesioner secara manual kepada petugas survei. Melalui inovasi OPEDASS pengumpulan data survei dilakukan secara digital melalui Google Form. Kuesioner disebarluaskan melalui tautan yang dapat diakses secara online. Responden dapat mengisi kuesioner melalui perangkat mereka, seperti komputer, ponsel, atau tablet dengan koneksi internet.
Jangkauan distribusi kuesioner dan jumlah pengakses	Sebelumnya kuesioner fisik harus didistribusikan secara langsung kepada responden. Hal ini memerlukan waktu, biaya untuk pengiriman atau penyebaran fisik melalui pos, pertemuan tatap muka, atau pengumpulan langsung dari responden. Setelah ada inovasi OPEDASS, kuesioner statistik sektoral disampaikan kepada responden menggunakan <i>Google Form</i> yang mudah diakses melalui tautan dan dapat disebarluaskan melalui email, media sosial, atau platform online lainnya. Responden dapat mengisi kuesioner dengan mudah kemudian mengirimkan langsung dan terekap langsung oleh petugas survei tanpa harus bertemu secara langsung
validasi dan batasan otomatis	Pada survei penggalian data statistik sektoral secara manual, validasi dan batasan biasanya memerlukan pemantauan manual. Hal ini bisa memakan waktu dan memerlukan intervensi manusia untuk memastikan konsistensi dan keabsahan data. Melalui survei digital by google form sudah menyediakan fitur validasi dan batasan otomatis, seperti memerlukan pengisian wajib pada beberapa pertanyaan, membatasi pilihan jawaban dengan opsi prasetel, dan melakukan validasi format jawaban. Hal ini membantu memastikan konsistensi dan keakuratan data.
Pembaruan dan Pemantauan Real-time:	Pada survei data statistik sektorat secara manual, memerlukan waktu pengumpulan kuesioner dari responden secara fisik dan memasukkan data/ entry ke dalam sistem. Pembaruan dan pemantauan real time tidak memungkinkan dilakukan, sedangkan setalah ada inovasi OPEDASS melalui survei google form, data yang dikumpulkan secara <i>real time</i> tersedia di panel

Indikator	Deskripsi Perubahan
	pengelolaan survei. Anda dapat melihat respons yang masuk secara langsung dan menganalisis data saat survei masih berlangsung.
Analisis dan Pengolahan Data	Analisis data yang dihasilkan melalui survei manual harus diolah terlebih dahulu secara manual. Hal ini memerlukan waktu dan usaha untuk mentranskripsi data dari kuesioner fisik ke format digital dan memprosesnya. Sedangkan survei digital menggunakan <i>Google Form</i> dapat diimpor ke program analisis data atau <i>spreadsheet</i> untuk pemrosesan dan analisis lebih lanjut. Hal ini memudahkan proses analisis dan pengolahan data.

Sumber : Hasil Analisis, 2022

6.3 Analisis Dampak

Salah satu cara mengukur keberhasilan implementasi inovasi OPEDASS Dinas Kominfosan sudah melakukan survei kepuasan masyarakat (SKM) terhadap 19 penerima layanan inovasi OPEDASS dengan ringkasan hasil sebagai berikut :

- a. Sebanyak 31,6% dari 19 responden menyatakan sangat mudah mengisi kuesioner, sisanya 21,1% menyatakan mudah mengisi, namun masih terdapat 21,1% responden tidak mudah mengisi kuesioner.
- b. Terkait dengan kemampuan petugas dalam menyampaikan informasi terkait survei didominasi oleh pendapat sangat mampu dan mampu, masih terdapat 10,5% responden yang menyatakan petugas kurang mampu dalam menyampaikan informasi.
- c. Sebanyak 36,6% menyatakan sangat puas dan sebanyak 42,1% responden menyatakan puas terhadap kesopanan dan keramahan petugas dalam menyampaikan informasi terkait survei.
- d. Kompetensi dan kemampuan petugas survei dinilai responden sudah sangat kompeten dan kompeten, namun masih terdapat 5,2% responden menyatakan petugas survei kurang kompeten/ mampu.
- e. Terkait dengan sikap petugas survei sebagian besar responden menyatakan sangat baik dan baik (78,9%).

Pengumpulan data dengan cara digital atau elektronik memiliki sejumlah manfaat yang signifikan, yakni sebagai berikut :

- a. Efisiensi, pada pengumpulan data secara digital dapat menghemat waktu dan upaya yang diperlukan dalam proses pengumpulan informasi. Data dapat dikumpulkan secara langsung melalui formulir elektronik atau melalui

integrasi dengan sistem lain, mengurangi kebutuhan akan entri manual atau proses penginputan data, efisiensi pada waktu dan biaya yang biasa dikeluarkan ketika menggunakan survei secara manual.

- b. Akurasi, pada pengumpulan data digital dapat meningkatkan akurasi data karena minimnya kesalahan manusia yang terjadi selama proses penginputan manual. Validasi otomatis dan batasan yang diberlakukan dalam formulir digital dapat membantu memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan format yang diinginkan dan mengurangi kesalahan pengisian data.
- c. Konsistensi, pengumpulan data digital memungkinkan penggunaan field predetermined atau pilihan yang dapat dipilih secara otomatis. Hal ini memastikan konsistensi dalam pengumpulan data dengan memastikan bahwa entri data memenuhi standar yang ditetapkan dan format yang diinginkan.
- d. Pembaruan *real time*, dengan pengumpulan data digital, pembaruan informasi dapat dilakukan secara *real time*. Ketika data diubah atau diperbarui, perubahan tersebut dapat segera tercermin dalam sistem. Hal ini memungkinkan akses terbaru ke informasi yang diperlukan dan mengurangi risiko menggunakan data yang tidak mutakhir.
- e. Penyimpanan dan pencarian yang mudah, data yang dikumpulkan secara digital dapat disimpan dengan mudah dalam basis data atau penyimpanan elektronik. Ini memudahkan akses dan pencarian data di masa depan. Sistem pencarian dapat digunakan untuk menemukan data berdasarkan kriteria tertentu, menghemat waktu dalam proses penelusuran informasi.
- f. Analisis dan pemrosesan lebih lanjut, data yang dikumpulkan secara digital dapat dengan mudah diolah, dianalisis, dan digunakan untuk membuat laporan atau analisis lebih lanjut. Dengan menggunakan alat analisis data, seperti spreadsheet atau perangkat lunak statistik, data dapat dieksplorasi dan dimanfaatkan untuk mengambil keputusan yang lebih baik.
- g. Pengurangan pemakaian kertas/ *paperless*, dalam proses pengumpulan dan penyimpanan data. Hal ini berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap alam.